

NOTA DINAS

Nomor: 15/SJ-IND.9/II/2022

Yth. : Bapak Sekretaris Jenderal
Dari : Kepala Pusat Pemberdayaan Industri Halal
Hal : Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja PPIH Tahun 2021
Lampiran : 1 (satu) berkas
Tanggal : 8 Februari 2021

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang di dalamnya tercantum kewajiban atas penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP), bersama ini kami sampaikan LAKIP Tahun 2021 Pusat Pemberdayaan Industri Halal Kementerian Perindustrian.

Demikian, atas perhatian dan arahan lebih lanjut dari Bapak kami sampaikan terima kasih.



Kepala Pusat Pemberdayaan Industri Halal

Junadi Marki

Tembusan:

1. Kepala Biro Perencanaan.



**Kementerian
Perindustrian**
REPUBLIK INDONESIA

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)**

**PUSAT PEMBERDAYAAN INDUSTRI HALAL
(PPIH) TAHUN 2021**

**KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
SEKRETARIAT JENDERAL
2021**

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan kinerja, Pusat Pemberdayaan Industri Halal (PPIH) menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2021 yang didalamnya menguraikan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian atas perjanjian kinerja tersebut, dan realisasi anggaran.

Disamping itu, laporan ini juga berfungsi sebagai sarana bagi Pusat Pemberdayaan Industri Halal dalam rangka kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders sesuai Peraturan Menpan dan Refomasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, juga sebagai sarana evaluasi mandiri (*self evaluation*) atas pencapaian kinerja Pusat Pemberdayaan Industri Halal (PPIH) dalam upaya penyempurnaan kinerja, terutama dalam hal dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan serta kebijakan kegiatan di tahun mendatang.

Kami berharap penyusunan **LAKIP** ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan di masa yang akan datang.

Jakarta, 7 Februari 2022

Kepala Pusat Perberdayaan Industri Halal



Junadi Marki

BAB I

PENDAHULUAN

TUPOKSI (Tugas Pokok dan Fungsi) merupakan bagian yang sangat penting untuk menentukan peran yang harus dijalankan oleh Pusat Pemberdayaan Industri Halal sebagai salah satu unit organisasi yang mempunyai peranan strategis dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pokok Kementerian Perindustrian.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian No. 7 TAHUN 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Pusat Pemberdayaan Industri Halal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan industri halal.

Pasal 249

1. Pusat Pemberdayaan Industri Halal yang selanjutnya disebut PPIH berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal;
2. Pusat Pemberdayaan Industri Halal dipimpin oleh Kepala Pusat.

Pasal 250

1. PPIH mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan industri halal.

Pasal 251

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, dalam pasal 250 Pusat Pemberdayaan Industri Halal berfungsi :

1. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program di bidang koordinasi percepatan dan pembinaan industri halal serta fasilitasi industri halal pada industri kecil dan menengah;
2. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang koordinasi percepatan dan pembinaan industri halal serta fasilitasi industri halal pada industri kecil dan menengah;
3. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang koordinasi percepatan dan pembinaan industri halal serta fasilitasi industri halal pada industri kecil dan menengah; dan;

4. pelaksanaan urusan anggaran, keuangan, sumber daya manusia, organisasi, tata laksana, barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan rumah tangga pusat.

1.2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi merupakan bagian yang tak kalah pentingnya bagi Pusat Pemberdayaan Industri Halal dalam menjalankan aktivitas manajemen, baik kegiatan operasional (substantif) maupun kegiatan yang bersifat administratif.

Organisasi Pusat Pemberdayaan Industri Halal Kementerian Perindustrian, disusun sesuai Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian dan dijabarkan melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian pada Bab XIV Bagian Kedua sebagaimana berikut:

Pasal 252

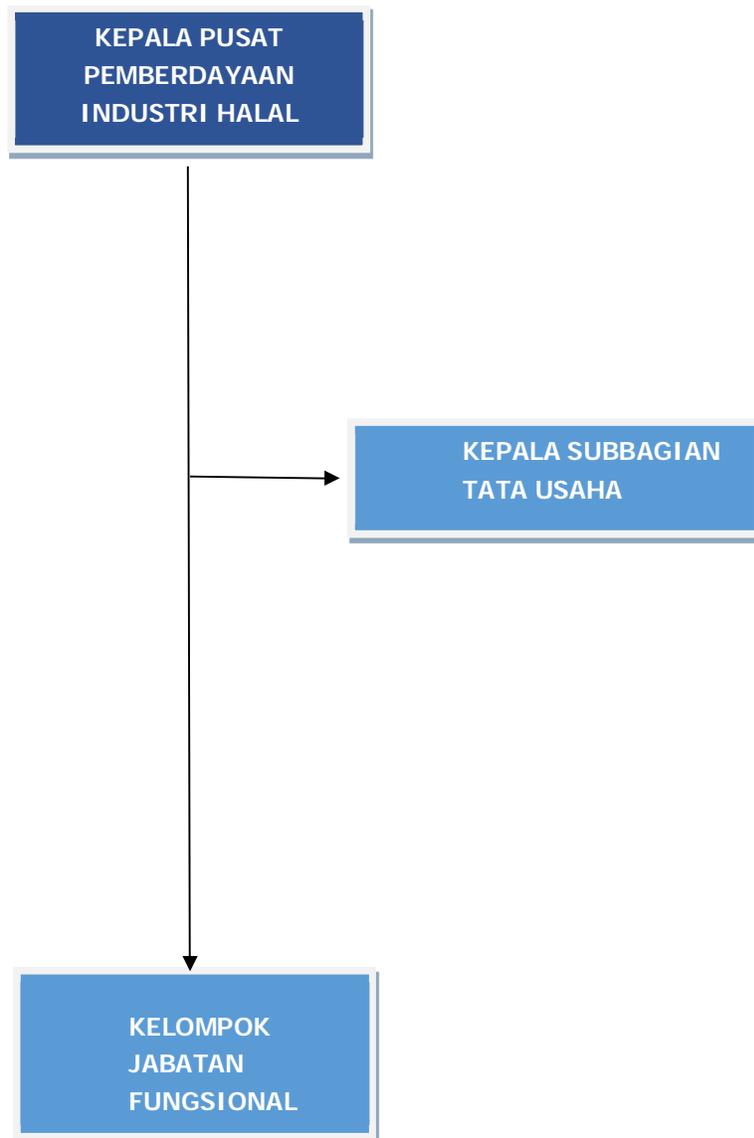
Pusat Pemberdayaan Industri Halal terdiri dari :

1. Kepala Pusat Pemberdayaan Industri Halal;
2. Kepala Subbagian Tata Usaha;
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 253

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan anggaran, keuangan, sumber daya manusia, organisasi, tata laksana, barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan rumah tangga pusat.

Berdasarkan Permenperin tersebut struktur organisasi Pusat Pemberdayaan Industri Halal terdiri atas Kepala Pusat Pemberdayaan Industri Halal, Kepala Subbagian Tata Usaha dan kelompok Jabatan Fungsional. Sementara para pejabat fungsional berada langsung di bawah Kepala Pusat Pemberdayaan Industri Halal. Gambaran struktur organisasi Pusat Pemberdayaan Industri Halal selengkapnya dapat dilihat pada bagan di bawah ini.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Pusat Pemberdayaan Industri Halal

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Pusat Pemberdayaan Industri Halal

A. Tujuan Strategis

Pusat Pemberdayaan Industri Halal berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal. Oleh karena itu, Pusat Pemberdayaan Industri Halal perlu mendukung dan mengoptimalkan segenap potensi yang ada untuk mewujudkan visi Kementerian Perindustrian dan Sekretariat Jenderal yang juga merupakan visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong Negara apabila dipandang dalam sudut pandang sektor industri yaitu mewujudkan industri tangguh dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri dalam mengelola sumber daya yang ada dengan peningkatan nilai tambah, penyerapan tenaga kerja melalui penambahan lapangan kerja baru serta meningkatnya investasi dan ekspor sektor industri sehingga dapat bersaing dengan negara maju lainnya. Pemanfaatan teknologi dimaksudkan dapat mengelola sumber daya yang ada dengan kekuatan SDM yang kompeten dan IPTEK yang inovatif melalui implementasi Making Indonesia 4.0 untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata. Dalam rangka mewujudkan komitmen dalam pelaksanaan tugas fungsi yang diamanatkan oleh Permenperin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Pusat Pemberdayaan Industri Halal juga menetapkan visi internal sebagai berikut: “Mewujudkan Keberdayaan Industri Halal Indonesia di Kancah Dunia” (masih dalam finalisasi). Visi internal Pusat Pemberdayaan Industri Halal ini merupakan refleksi bagaimana Pusat Pemberdayaan Industri Halal akan senantiasa berupaya mewujudkan industri halal yang tangguh, yang mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri sebagai penjabaran visi Presiden dan Wakil Presiden dari sudut pandang industri. Visi ini juga berperan penting dalam penyelenggaraan fungsi Kementerian Perindustrian dalam perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan

industri hijau, pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah, penyebaran dan pemerataan pembangunan industri (masih dalam proses finalisasi).

Dalam pelaksanaan visi dan misinya, seluruh pegawai Pusat Pemberdayaan Industri Halal diharapkan dapat mengacu pada nilai-nilai yang telah ditetapkan Kementerian Perindustrian untuk mewujudkan manusia yang berintegritas, mau bekerja keras dan semangat bergotong royong yang diharapkan berdampak positif bagi pertumbuhan industri di Indonesia. Nilai-nilai tersebut terdiri dari integritas, profesional, inovatif, produktif dan kompetitif. Kelima nilai ini disebut INSAN OKE, yang harus diketahui, dipahami dan diamalkan oleh semua aparatur Kementerian Perindustrian dalam bekerja, bersikap, dan berkontribusi dalam pengembangan industri nasional. Penjabaran dari masing-masing nilai tersebut sebagai berikut:

1. Integritas diartikan berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral yang berlaku. Dengan memegang teguh integritas, maka perilaku utama yang dijalani oleh para pegawai di lingkungan Kementerian Perindustrian adalah bertindak dengan konsisten yang dilandasi dengan norma dan kode etik profesi; serta bekerja dengan penuh tanggung jawab dan transparan.
2. Profesional diartikan bekerja dengan tuntas dan akurat didasarkan kompetensi terbaik, penuh tanggung jawab dan memiliki komitmen yang tinggi. Perilaku utama dari profesionalitas adalah bekerja dengan kualifikasi teknis, standar profesi dan prosedur baku; serta melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang relevan.
3. Inovatif diartikan berupaya melakukan berbagai penyempurnaan yang memiliki nilai tambah untuk mengimplementasikan gagasan sebagai solusi alternatif guna mempermudah proses kerja yang lebih baik, cepat dan tepat. Perilaku utama dari nilai kerja inovatif adalah selalu melakukan perbaikan proses dan cara kerja secara berkesinambungan; serta mengembangkan ide baru, alternatif atau kreasi dalam meningkatkan pelayanan kepada para pemangku kepentingan.
4. Produktif diartikan mengelola sumber daya secara efektif dan efisien untuk memberikan hasil kerja yang bermanfaat dan tepat guna sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Perilaku utama dari nilai produktif ini adalah bekerja dengan menggunakan sumber daya secara optimal

LAPORAN AKUNTABILITAS KERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

mencapai kinerja yang maksimal; serta hasil kerja memberikan manfaat dan berguna bagi para pemangku kepentingan.

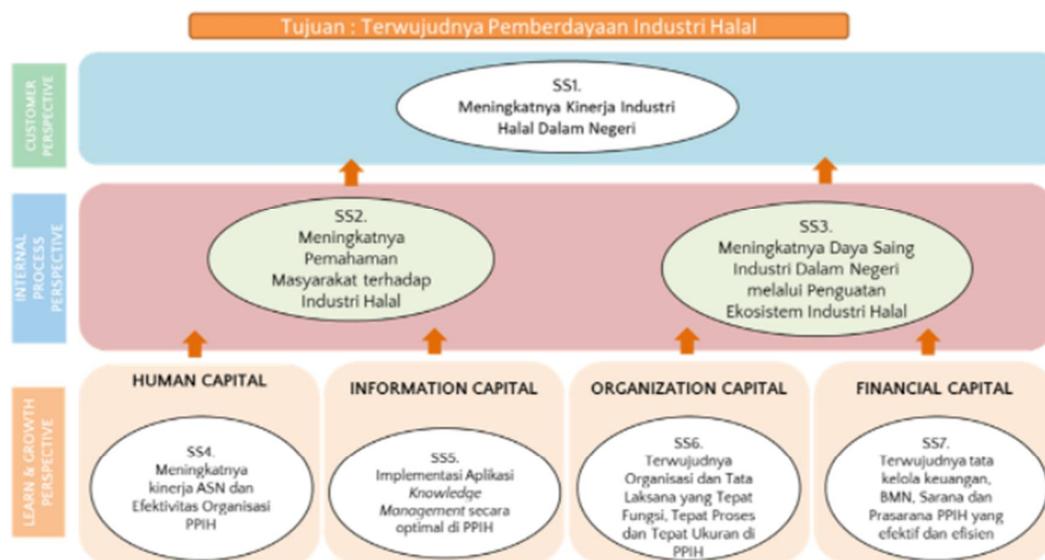
5. Kompetitif diartikan menjadi yang terbaik, memiliki daya saing dan keunggulan serta berguna baik bagi dirinya sendiri, masyarakat, bangsa dan negara. Nilai kerja ini terpancar dari perilaku utama yang dimiliki, yakni bersikap dan berperilaku untuk menjadi yang terbaik; serta mengedepankan keunggulan atau keunikan yang dimilikinya dalam menghadapi persaingan.

B. Tujuan Strategis

Dalam rangka mewujudkan misi Visi dan Misi pembangunan industri, Pusat Pemberdayaan Industri Halal Kemenperin menetapkan tujuan yang ingin dicapai, yaitu: "Terwujudnya Pemberdayaan Industri Halal" dengan indikator tujuan yakni Indeks Pemberdayaan Industri Halal.

C. Sasaran Strategis

Untuk mencapai tujuan Pusat Pemberdayaan Industri Halal Kementerian Perindustrian yang telah ditetapkan, maka perlu dijabarkan dalam beberapa sasaran strategi menggunakan pendekatan metoda Balanced Score Card (BSC) yang dibagi dalam tiga perspektif, yakni *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learn and growth perspective*, sebagai berikut:



Gambar 2-1. Peta Strategis Pusat Pemberdayaan Industri Halal 2020-2024

1. *Customer Perspective*, terdiri atas 1 (satu) sasaran strategis (SS) sebagai berikut:

- Sasaran Strategis 1: Meningkatkan Kinerja Industri Halal Dalam Negeri, dengan Indikator Kinerja Utama (IKU):

- a. Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di PPIH;
- b. Tingkat sinergitas regulasi bidang industri halal;
- c. Tingkat efektivitas pelaksanaan promosi dan kampanye industri halal.

2. *Internal Process Perspective*, terdiri atas 2 (dua) sasaran strategis (SS)

- Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Industri Halal, dengan Indikator Kinerja Utama (IKU):
 - a. Indeks tingkat pemahaman industri halal;
 - b. Terlaksananya koordinasi pembinaan dan pemberdayaan industri halal;
- Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Daya Saing Industri Dalam Negeri melalui Penguatan Ekosistem Industri Halal, dengan Indikator Kinerja Utama (IKU):
 - a. Jumlah industri halal yang diberikan fasilitasi sertifikasi produk halal; dan
 - b. Tersedianya SDM industri halal yang profesional dan kompeten.

3. *Learn and Growth Perspective*, terdiri atas 4 (empat) sasaran strategis (SS)

- Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Kinerja ASN dan Efektivitas Organisasi PPIH, dengan Indikator Kinerja (IK):
 - a. Rata-rata indeks profesionalitas ASN PPIH.
- Sasaran Strategis 5: Implementasi Aplikasi Knowledge Management Secara Optimal di PPIH, dengan Indikator Kinerja (IK):
 - a. Rata-rata informasi yang dibagikan ke aplikasi Knowledge Management Intranet.
- Sasaran Strategis 6: Terwujudnya Organisasi dan Tata Laksana yang Tepat Fungsi, Tepat Proses dan Tepat Ukuran di PPIH, dengan Indikator Kinerja (IK):
 - a. Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) PPIH.
- Sasaran Strategis 7: Terwujudnya Tata Kelola Keuangan, BMN, Sarana dan Prasarana PPIH yang Efektif dan Efisien, dengan Indikator Kinerja (IK):
 - a. Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker.

2.2 Rencana Kinerja Pusat Pemberdayaan Industri Halal 2021

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, tugas Pusat Pemberdayaan Industri Halal adalah melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan industri halal. Untuk itu program yang melekat pada PPIH pada tahun 2021 ini adalah "Program

Dukungan Manajemen” dengan mengusung 1 (satu) kegiatan utama yaitu “Pengembangan Industri Produk Halal”. Adapun rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2021 sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Strategis PPIH adalah sebagai berikut:

Perspektif Pemangku Kepentingan

Strategi 1 : Meningkatnya Kinerja Industri Halal Dalam Negeri, dengan Indikator Kinerja Utama (IKU):

- a. Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di PPIH dengan target 75 persen;
- b. Tingkat sinergitas regulasi bidang industri halal dengan target 25 persen;
- c. Tingkat efektivitas pelaksanaan promosi dan kampanye industri halal dengan target 2,75 skala (1-4)

Perspektif Proses Bisnis Internal

Strategi 2 : Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Industri Halal, dengan Indikator Kinerja Utama (IKU):

- a. Indeks tingkat pemahaman industri halal dengan target 2,75 skala (1-4);

Strategi 3 : Meningkatnya Daya Saing Industri Dalam Negeri melalui Penguatan Ekosistem Industri Halal, dengan Indikator Kinerja Utama (IKU):

- a. Jumlah industri halal yang diberikan fasilitasi sertifikasi produk halal dengan target 45 perusahaan; dan
- b. Tersedianya SDM industri halal yang profesional dan kompeten dengan target 61 orang.

Perspektif Pembelajaran Organisasi

Strategi 4 : Meningkatnya Kinerja ASN dan Efektivitas Organisasi PPIH, dengan Indikator Kinerja Utama (IKU):

- a. Rata-rata indeks profesionalitas ASN PPIH dengan target indeks 71.

Strategi 5 : Implementasi Aplikasi Knowledge Management Secara Optimal di PPIH, dengan Indikator Kinerja Utama (IKU):

- a. Rata-rata informasi yang dibagikan ke aplikasi Knowledge Management Intranet dengan target 6 informasi.

Strategi 6: Terwujudnya Organisasi dan Tata Laksana yang Tepat Fungsi, Tepat Proses dan Tepat Ukuran di PPIH, dengan Indikator Kinerja Utama (IKU):

- a. Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) PPIH dengan target indeks 3.

Strategi 7: Terwujudnya Tata Kelola Keuangan, BMN, Sarana dan Prasarana PPIH yang Efektif dan Efisien, dengan Indikator Kinerja Utama (IKU):

- a. Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker dengan target 91,5 persen.

2.3 Perjanjian Kinerja Pusat Pemberdayaan Industri Halal 2021

Berdasarkan rencana kinerja yang telah disusun, maka kinerja yang akan dicapai PPIH pada tahun 2021 telah ditetapkan didalam perjanjian kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Pusat Pemberdayaan Industri Halal

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Satuan
1.	Meningkatnya Kinerja Industri Halal Dalam Negeri	1. Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di PPIH	75	Persen
		2. Tingkat sinergitas regulasi bidang industri halal	25	Persen
		3. Tingkat efektivitas pelaksanaan promosi dan kampanye industri halal	2,75	Skala (1-4)
2.	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Industri Halal	1. Indeks tingkat pemahaman industri halal	2,75	Skala Likert
3.	Meningkatnya Daya Saing Industri Dalam Negeri melalui Penguatan Ekosistem Industri Halal	1. Jumlah industri halal yang diberikan fasilitasi sertifikasi produk halal	45	Perusahaan
		2. Tersedianya SDM industri halal yang profesional dan kompeten	61	Orang
4.	Meningkatnya Kinerja ASN dan Efektivitas Organisasi PPIH	1. Rata-rata indeks profesionalitas ASN PPIH	71	Indeks
5.	Implementasi Aplikasi Knowledge Management secara optimal di PPIH	1. Rata-rata informasi yang dibagikan ke aplikasi Knowledge Management Intranet	6	Informasi
6.	Terwujudnya Organisasi dan Tata Laksana yang Tepat Fungsi, Tepat Proses dan Tepat Ukuran di PPIH	1. Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) PPIH	3	Indeks
7.	Terwujudnya Tata Kelola Keuangan, BMN, Sarana dan Prasarana PPIH yang Efektif dan Efisien	1. Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	91.5	Persen

2.4 Anggaran Pusat Pemberdayaan Industri Halal 2021

Pada tahun 2021, Pusat Pemberdayaan Industri Halal mendapatkan alokasi anggaran awal sebesar Rp 6.100.000.000,- namun dengan adanya penambahan pagu selama tahun berjalan sehingga pagu akhir PPIH menjadi Rp 8.183.768.000,- (Delapan miliar seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah). Adapun besar pagu untuk masing-masing Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) dapat dilihat pada Tabel 2.3

Tabel 2.3

Pagu Anggaran Pusat Pemberdayaan Industri Halal Tahun 2021

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	PAGU
WA	Program Dukungan Manajemen	8.183.768.000
6561	Pengembangan Industri Produk Halal	8.183.768.000
6561.ABK	Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri Dan Umkm	547.780.000
001	Kajian Indeks Pembinaan Dan Pemberdayaan Industri Halal	335.126.000
002	Rekomendasi Kebijakan Tentang Panduan Pembinaan Dan Pemberdayaan Industri Halal	212.654.000
6561.AEH	Promosi	4.191.205.000
001	Promosi Dan Pendampingan Penerapan Industri Halal	442.011.000
002	Industri Halal Award	3.657.194.000
003	Website Industri Halal	92.000.000
6561.BDI	Fasilitas Dan Pembinaan Industri	866.852.000
001	Fasilitasi Dan Pembinaan Industri Halal	866.852.000
6561.EAA	Layanan Perkantoran	2.146.187.000
001	Layanan Perkantoran	2.146.187.000
6561.EAB	Layanan Perencanaan Dan Penganggaran Internal	173.044.000
001	Layanan Tata Usaha Dan Dukungan Manajemen	173.044.000
6561.EAD	Layanan Sarana Internal	258.700.000
001	Layanan Sarana Internal	258.700.000
	TOTAL	8.183.768.000

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Hasil Yang Telah Dicapai

Sampai dengan akhir Triwulan IV tahun 2021 PPIH telah merealisasikan kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

3.1.1. Realisasi Keuangan dan Realisasi Fisik

Realisasi keuangan Pusat Pemberdayaan Industri Halal sampau dengan Triwulan IV tahun 2021 adalah sebesar Rp 7.180.283.368,- atau sebesar 87,74% dan realisasi fisik sebesar 100% sebagaimana Tabel 3.1

Tabel 3.1
Realisasi Anggaran dan Realisasi Fisik PPIH s/d Triwulan IV Tahun 2021

KODE	OUTPUT / RINCIAN AKUN	PAGU	REALISASI		REAL. FISIK
			Rp	%	
WA	Program Dukungan Manajemen	8.183.768.000	7.180.283.368	87,74	100%
6561	Pengembangan Industri Produk Halal	8.183.768.000	7.180.283.368	87,74	100%
6561.AB	Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri Dan Umkm	547.780.000	533.888.615	97,46	100%
001	Kajian Indeks Pembinaan Dan Pemberdayaan Industri Halal	335.126.000	325.927.194	97,26	
051	Penyusunan Kajian Tentang Pengembangan, Fasilitasi, Dan Pembinaan Industri Halal	335.126.000	325.927.194	97,26	
A	Tanpa Sub Komponen	335.126.000	325.927.194	97,26	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	32.700.000	30.450.000	93,12	
522151	Belanja Jasa Profesi	66.000.000	65.400.000	99,09	
522191	Belanja Jasa Lainnya	185.416.000	185.072.800	99,81	
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi Covid-19	2.400.000	1.623.000	67,63	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	27.310.000	22.271.994	81,55	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	21.300.000	21.109.400	99,11	
002	Rekomendasi Kebijakan Tentang Panduan Pembinaan Dan Pemberdayaan Industri Halal	212.654.000	207.961.421	97,79	
051	Penyusunan Kebijakan Tentang Pengembangan, Fasilitasi, Dan Pembinaan Industri Halal	212.654.000	207.961.421	97,79	
A	Tanpa Sub Komponen	212.654.000	207.961.421	97,79	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	31.200.000	31.200.000	100,00	
522151	Belanja Jasa Profesi	13.000.000	12.300.000	94,62	
522191	Belanja Jasa Lainnya	136.744.000	136.467.100	99,80	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	16.310.000	13.144.600	80,59	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	15.400.000	14.849.721	96,43	
6561.AE	Promosi	4.191.205.000	3.604.030.876	85,99	100%
H					
001	Promosi Dan Pendampingan Penerapan Industri Halal	442.011.000	302.678.984	68,48	

LAPORAN AKUNTABILITAS KERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

KODE	OUTPUT / RINCIAN AKUN	PAGU	REALISASI		REAL. FISIK
			Rp	%	
051	Promosi Dan Pendampingan Penerapan Industri Halal	442.011.000	302.678.984	68,48	
A	Tanpa Sub Komponen	442.011.000	302.678.984	68,48	
521211	Belanja Bahan	10.332.000	9.252.500	89,55	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	29.700.000	29.700.000	100,00	
522151	Belanja Jasa Profesi	21.400.000	0	0,00	
522191	Belanja Jasa Lainnya	182.000.000	181.115.000	99,51	
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi Covid-19	28.000.000	18.084.000	64,59	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	164.819.000	59.597.484	36,16	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.760.000	4.930.000	85,59	
002	Industri Halal Award	3.657.194.000	3.250.366.892	88,88	
051	Penyelenggaraan Industri Halal Award	3.657.194.000	3.250.366.892	88,88	
A	Tanpa Sub Komponen	3.657.194.000	3.250.366.892	88,88	
521211	Belanja Bahan	326.958.000	287.963.000	88,07	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	34.200.000	31.950.000	93,42	
522151	Belanja Jasa Profesi	70.000.000	7.400.000	10,57	
522191	Belanja Jasa Lainnya	2.629.000.000	2.526.192.900	96,09	
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi Covid-19	40.500.000	39.580.000	97,73	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	311.656.000	168.998.431	54,23	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.880.000	2.460.000	85,42	
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	242.000.000	185.822.561	76,79	
003	Website Industri Halal	92.000.000	50.985.000	55,42	
051	Pengembangan Website Industri Halal	92.000.000	50.985.000	55,42	
A	Tanpa Sub Komponen	92.000.000	50.985.000	55,42	
521211	Belanja Bahan	2.000.000	1.980.000	99,00	
522191	Belanja Jasa Lainnya	90.000.000	49.005.000	54,45	
6561.BDI	Fasilitas Dan Pembinaan Industri	866.852.000	853.370.189	98,44	100%
001	Fasilitas Dan Pembinaan Industri Halal	866.852.000	853.370.189	98,44	
051	Fasilitas Industri Halal	866.852.000	853.370.189	98,44	
A	Tanpa Sub Komponen	866.852.000	853.370.189	98,44	
521211	Belanja Bahan	10.010.000	10.000.000	99,90	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	29.700.000	29.700.000	100,00	
522131	Belanja Jasa Konsultan	45.000.000	44.825.000	99,61	
522151	Belanja Jasa Profesi	14.400.000	14.200.000	98,61	
522191	Belanja Jasa Lainnya	672.764.000	670.497.000	99,66	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	92.698.000	81.868.189	88,32	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.280.000	2.280.000	100,00	
6561.EA	Layanan Perkantoran	2.146.187.000	1.850.815.294	86,24	100%
A					
001	Layanan Perkantoran	2.146.187.000	1.850.815.294	86,24	
001	Gaji Dan Tunjangan	1.248.260.000	1.057.287.252	84,70	
A	Tanpa Sub Komponen	1.248.260.000	1.057.287.252	84,70	
511111	Belanja Gaji Pokok Pns	378.130.000	258.924.900	68,48	
511119	Belanja Pembulatan Gaji Pns	30.000	3.785	12,62	
511121	Belanja Tunj. Suami/istri Pns	25.130.000	17.798.820	70,83	
511122	Belanja Tunj. Anak Pns	9.090.000	5.563.952	61,21	
511123	Belanja Tunj. Struktural Pns	43.595.000	30.280.000	69,46	
511124	Belanja Tunj. Fungsional Pns	13.000.000	9.864.000	75,88	
511125	Belanja Tunj. Pph Pns	4.600.000	4.567.216	99,29	
511126	Belanja Tunj. Beras Pns	20.785.000	14.411.580	69,34	
511129	Belanja Uang Makan Pns	86.400.000	66.317.000	76,76	

LAPORAN AKUNTABILITAS KERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

KODE	OUTPUT / RINCIAN AKUN	PAGU	REALISASI		REAL. FISIK
			Rp	%	
511151	Belanja Tunjangan Umum Pns	7.500.000	4.460.000	59,47	
512411	Belanja Pegawai (tunjangan Khusus/kegiatan/kinerja)	660.000.000	645.095.999	97,74	
002	Operasional Dan Pemeliharaan Kantor	897.927.000	793.528.042	88,37	
A	Operasional Dan Pemeliharaan Kantor	897.927.000	793.528.042	88,37	
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	188.389.000	188.113.478	99,85	
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	100.000	88.000	88,00	
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	57.160.000	54.804.000	95,88	
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19	83.410.000	83.273.464	99,84	
521211	Belanja Bahan	20.225.000	20.102.500	99,39	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	75.843.000	75.745.450	99,87	
522141	Belanja Sewa	109.500.000	97.898.757	89,41	
522191	Belanja Jasa Lainnya	47.275.000	43.750.000	92,54	
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi Covid-19	76.000.000	66.808.700	87,91	
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	27.000.000	14.580.000	54,00	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	213.025.000	148.363.693	69,65	
6561.EA	Layanan Perencanaan Dan Penganggaran Internal	173.044.000	79.485.574	45,93	100%
B					
001	Layanan Tata Usaha Dan Dukungan Manajemen	173.044.000	79.485.574	45,93	
051	Penyusunan Rencana Program Dan Penyusunan Rencana Anggaran	42.680.000	6.760.000	15,84	
A	Tanpa Sub Komponen	42.680.000	6.760.000	15,84	
521211	Belanja Bahan	10.280.000	4.060.000	39,49	
522151	Belanja Jasa Profesi	18.000.000	2.700.000	15,00	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	14.400.000	0	0,00	
052	Pelaksanaan Pemantauan Dan Evaluasi	48.584.000	22.539.574	46,39	
A	Tanpa Sub Komponen	48.584.000	22.539.574	46,39	
521211	Belanja Bahan	6.000.000	5.995.000	99,92	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	24.584.000	12.794.574	52,04	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	18.000.000	3.750.000	20,83	
054	Pelayanan Tata Usaha Dan Rumah Tangga	81.780.000	50.186.000	61,37	
A	Pelayanan Tu, Keuangan Dan Kepegawaian	81.780.000	50.186.000	61,37	
521211	Belanja Bahan	8.280.000	0	0,00	
522191	Belanja Jasa Lainnya	60.000.000	48.686.000	81,14	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	13.500.000	1.500.000	11,11	
6561.EA	Layanan Sarana Internal	258.700.000	258.692.820	100,00	100%
D					
001	Layanan Sarana Internal	258.700.000	258.692.820	100,00	
051	Pengadaan Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran	258.700.000	258.692.820	100,00	
A	Tanpa Sub Komponen	258.700.000	258.692.820	100,00	
532111	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	258.700.000	258.692.820	100,00	
	TOTAL	8.183.768.000	7.180.283.368	87,74	100%

3.1.2. Kegiatan yang Telah Dilaksanakan

Sampai dengan Triwulan IV tahun 2021 Pusat Pemberdayaan Industri Halal memiliki alokasi anggaran sebesar Rp 4.483.768.000,-. Pencapaian realisasi anggaran PPIH sampai dengan Triwulan IV adalah Rp 7.180.283.368,- atau sebesar 87,74% dan realisasi fisik sebesar 100% Realisasi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan

sasaran PPIH yang dicapai sampai dengan akhir Triwulan IV Tahun 2021 untuk masing-masing keenam Klasifikasi Rincian Output (KRO) adalah sebagai berikut:

A. Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri Dan UMKM

KRO ini memiliki 2 (dua) Rincian Output (RO) yaitu Kajian Indeks Pembinaan Dan Pemberdayaan Industri Halal dan Rekomendasi Kebijakan Tentang Panduan Pembinaan Dan Pemberdayaan Industri Halal. Pagu anggaran untuk KRO ini adalah sebesar Rp 547.780.000,-, dengan realisasi anggaran pada Triwulan IV Tahun 2021 adalah sebesar Rp 533.888.615,- atau sebesar 97,46 % dan realisasi fisik 100%.

Realisasi fisik dan keuangan pada output ini diperoleh melalui pelaksanaan beberapa kegiatan, diantaranya adalah : Menyenggarakan rapat koordinasi dengan Kemenhub (Dit. laut dan Dit. Udara) dalam rangka Halal Hub sektor Makanan dan Minuman (F&B Hub), Melakukan koordinasi internal baik PPIH maupun Kemenperin dalam rangka persamaan persepsi dalam rangka penyusunan laporan, Melakukan koordinasi internal baik PPIH maupun Kemenperin dalam rangka persamaan persepsi dalam rangka penyusunan rancangan peraturan tentang Pengembangan Industri Halal, Melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan (akademisi, internal kemenperin, KNEKS) dalam rangka perumusan rekomendasi kebijakan pengembangan industri halal.

B. Promosi

KRO ini memiliki 3 (tiga) Rincian Output (RO) yaitu Penyelenggaraan Industri Halal Award, Promosi Dan Pendampingan Penerapan Industri Halal serta Pengembangan Website Industri Halal Pagu anggaran untuk KRO ini adalah sebesar Rp 4.191.205.000,-, dengan realisasi anggaran pada Triwulan IV Tahun 2021 adalah sebesar Rp 3.604.030.876,- atau sebesar 85,99% dan realisasi fisik 100%.

Realisasi fisik dan keuangan pada output ini diperoleh melalui pelaksanaan beberapa kegiatan, diantaranya Menyenggarakan Acara Penganugerahan Indonesia Halal Industry Awards 2021 dan Melaksanakan koordinasi, site visit telah selesai dilaksanakan di Makassar, Surabaya dan Banten dalam rangka Sosialisasi IHYA 2021, dan Penyelenggaraan webinar diganti dengan Podcast Halal bersama Balai Besar Keramik dan Balai Besar Tekstil " Halal Talk Produk Gunaan - Tableware Keramik dan Modest Fashion), Pembuatan Website Pusat Pemberdayaan Industri Halal, Benchmarking Website dan Pengumpulan List Informasi.

C. Fasilitas Dan Pembinaan Industri

KRO ini hanya terdiri atas 1 (satu) RO yaitu Fasilitas Dan Pembinaan Industri Halal, dengan pagu anggaran sebesar Rp 866.852.000,-. Realisasi anggaran pada Triwulan IV Tahun 2021 untuk KRO ini adalah sebesar Rp 853.370.189,-, atau sebesar 98,44 % dan realisasi fisik 100%.

Realisasi fisik dan keuangan tersebut diperoleh melalui Fasilitas sertifikasi produk halal bagi 45 IKM wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur, pelatihan dan sertifikasi penyelia halal bagi KIH, HIPS dan IKM wilayah Jawa Timur, bimtek penggunaan manual SJPH dan penyusunan bahan ajar Penerapan Halal di Sektor Industri Manufaktur.

D. Layanan Perkantoran

KRO ini memiliki 2 (dua) Rincian Output (RO) yaitu Gaji dan Tunjangan serta Operasional Dan Pemeliharaan Kantor. KRO ini bersifat operasional/rutin dengan pagu anggaran sebesar Rp2.146.187.000,- dan realisasi anggaran pada Triwulan IV Tahun 2021 sebesar Rp 1.850.815.294,- atau sebesar 86,24% dengan realisasi fisik yang dicapai sebesar 100%.

Realisasi fisik dan keuangan pada output ini diperoleh melalui pelaksanaan beberapa kegiatan, diantaranya Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai PPIH serta Operasional Dan Pemeliharaan Kantor.

E. Layanan Perencanaan Dan Penganggaran Internal

KRO ini memiliki 3 (tiga) Rincian Output (RO) yaitu Penyusunan Rencana Program dan Anggaran, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi, serta Pelayanan Tata Usaha dan Rumah Tangga.

Pagu anggaran untuk KRO ini adalah sebesar Rp 173.044.000,-, dengan realisasi anggaran pada Triwulan IV Tahun 2021 adalah sebesar Rp 79.485.574,- atau sebesar 45,93% dan realisasi fisik 90,23%.

Realisasi fisik dan keuangan pada output ini diperoleh melalui Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan bulan November.

F. Layanan Sarana Internal

KRO ini terdiri atas 1 (satu) RO yaitu Layanan Sarana Internal, yang didalamnya terdapat 1 (satu) komponen kegiatan yaitu Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran, dengan pagu anggaran sebesar Rp 258.700.000,-.

Realisasi anggaran pada Triwulan IV Tahun 2021 adalah sebesar Rp 258.692.820,- atau sebesar 100% dan realisasi fisik 100%.

Realisasi fisik dan keuangan pada output ini diperoleh melalui pelaksanaan kegiatan Pengadaan Laptop dan Perlengkapan Sarana Internal untuk pegawai PPIH.

3.2. Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan sasaran kegiatan yang terdapat pada perjanjian kinerja Pusat Pemberdayaan Industri Halal tahun 2021, terdapat 1 (satu) sasaran kegiatan dari perspektif pemangku kepentingan/*stakeholders*, 2 (dua) sasaran kegiatan dari perspektif proses bisnis internal dan 4 (empat) sasaran kegiatan dari perspektif pembelajaran organisasi. Dari 7 (tujuh) sasaran kegiatan tersebut terdapat 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama Pusat Pemberdayaan Industri Halal. Untuk lebih detailnya, capaian dari sasaran strategis tersebut akan di jelaskan sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Kinerja Industri Halal Dalam Negeri

Sasaran Strategis ini terdiri atas 3 (Tiga) Indikator yaitu Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di PPIH, Tingkat sinergitas regulasi bidang industri halal, Tingkat efektivitas pelaksanaan promosi dan kampanye industri halal.

1. Indikator Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di PPIH dengan target 80 persen. Pada tahun 2021 PPIH melaksanakan proses pengadaan laptop sebanyak 22 unit merk Axioo yang keseluruhannya merupakan produk dalam negeri sehingga realisasi untuk indikator ini adalah sebesar 100 persen.
2. Indikator Tingkat sinergitas regulasi bidang industri halal dengan target 25 persen dan Realisasi 25 persen dalam proses penyelenggaraan FGD Pembahasan Industri Halal termasuk didalamnya Indeks Industri Halal dan Melakulan koordinasi dengan pemangku kepentingan (akademisi, internal kemenperin, KNEKS) dalam rangka perumusan rekomendasi kebijakan pengembangan industri halal dilaksanakan diperoleh melalui pelaksanaan kegiatan Penyusunan Panduan Pembinaan dan Pemberdayaan Industri Halal dan Penyusunan Road Map Industri Halal.
3. Indikator Tingkat efektivitas pelaksanaan promosi dan kampanye industri halal dengan target 2,75 Skala Likert dan Realisasi 2,75 Skala Likert dalam proses Pembuatan Telah selesai dilaksanakan pengambilan gambar di Jakarta, Padang dan Bukittinggi Telah dilakukan pengambilan gambar di Tangerang, Bekasi, Bandung dan

LAPORAN AKUNTABILITAS KERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

Bogor diperoleh melalui pelaksanaan kegiatan Pembuatan video promosi industri halal dan Partisipasi dalam Pameran Internasional.

Tabel 3.1.

Capaian Sasaran Strategis Terwujudnya Sistem Informasi Industri Yang Andal

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target								Capaian terhadap Target Jangka Menengah
		2020		2021			2022	2023	2024	
		T	R	T	R	C	T	T	T	
1. Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di PPIH	Persen	Belum menjadi indikator		75	100	133,33%	80	85	90	111,11%
2. Tingkat sinergitas regulasi bidang industri halal	Persen	Belum menjadi indikator		25	25	100,00%	50	75	100	25,00%
3. Tingkat efektivitas pelaksanaan promosi dan kampanye industri halal	Skala (1-4)	Belum menjadi indikator		2,75	2,75	100,00%	3	3,25	3,5	78,57%

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Industri Halal

Sasaran Strategis ini terdiri atas 1 (Satu) Indikator yaitu Indeks tingkat pemahaman industri halal.

1. Indikator Indeks tingkat pemahaman industri halal dengan target 2,75 Skala Likert dengan realisasi 2,75 Skala Likert melalui kuesioner yang diberikan kepada para peserta Indonesia Halal Industry Awards 2021.

Tabel 3.2.

Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Industri Halal

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target								Capaian terhadap Target Jangka Menengah
		2020		2021			2022	2023	2024	
		T	R	T	R	C	T	T	T	
1. Indeks tingkat pemahaman industri halal	Skala Likert	Belum menjadi indikator		2,75	2,75	100,00%	3	3,25	3,5	78,57%

LAPORAN AKUNTABILITAS KERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan Daya Saing Industri Dalam Negeri melalui Penguatan Ekosistem Industri Halal.

Sasaran Strategis ini terdiri atas 2 (Dua) Indikator yaitu Jumlah industri halal yang diberikan fasilitasi sertifikasi produk halal, Tersedianya SDM industri halal yang profesional dan kompeten.

1. Indikator Jumlah industri halal yang diberikan fasilitasi sertifikasi produk halal dengan target 45 perusahaan. Pada tahun 2021 PPIH telah melaksanakan fasilitasi sertifikasi produk halal kepada 45 pelaku usaha industri dengan rincian 15 pelaku usaha industri di Jawa Barat, 15 pelaku usaha di Jawa Tengah dan 15 pelaku usaha di Jawa Timur dengan demikian capaian untuk IKU ini adalah sebesar 100 persen.
2. Indikator Tersedianya SDM industri halal yang profesional dan kompeten dengan target 61 orang. Pada tahun 2021 PPIH telah melaksanakan fasilitasi pelatihan penyelia halal bagi para pelaku usaha industri yang merupakan SDM industri halal. Pada tahap pertama PPIH melaksanakan fasilitasi pelatihan penyelia bagi 44 orang orang pelaku IKM dan pada tahapan selanjutnya dalam kerangka fasilitasi sertifikasi halal produk, PPIH juga melaksanakan fasilitasi pelatihan penyelia bagi 45 orang pelaku IKM yang akan menerima sertifikasi halal produk. Sehingga capaian total SDM industri yang telah difasilitasi oleh PPIH adalah ssebanyak 89 orang atau apabila dibandingkan dengan target pada IKU capaiannya mencapai 145,9 persen.

Tabel 3.3

Capaian Sasaran Strategis Meningkatkan Daya Saing Industri Dalam Negeri melalui Penguatan Ekosistem Industri Halal

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target								Capaian terhadap Target Jangka Menengah
		2020		2021			2022	2023	2024	
		T	R	T	R	C	T	T	T	
1. Jumlah industri halal yang diberikan fasilitasi sertifikasi produk halal	Perusahaan	Belum menjadi indikator	45	45	100,00%	600	1000	2000	2,25%	
2. Tersedianya SDM industri halal yang profesional dan	Orang	Belum menjadi indikator	61	89	145,90%	50	60	70	127,14%	

Sasaran Strategis 4 : Meningkatkan Kinerja ASN dan Efektivitas Organisasi PPIH.

Sasaran Strategis ini terdiri atas 1 (Satu) Indikator yaitu Rata-rata indeks profesionalitas ASN PPIH.

1. Indikator Rata-rata indeks profesionalitas ASN PPIH dengan target 71 Indeks.
Indeks Profesionalitas ASN Pusat Pemberdayaan Halal adalah suatu instrumen yang

digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Pada tahun 2021 Indeks Profesionalitas ASN PPIH tercapai sebesar 71 sehingga capaian indikator adalah sebesar 100 persen.

Tabel 3.4
Capaian Sasaran Strategis Meningkatkan Kinerja ASN dan Efektivitas Organisasi PPIH

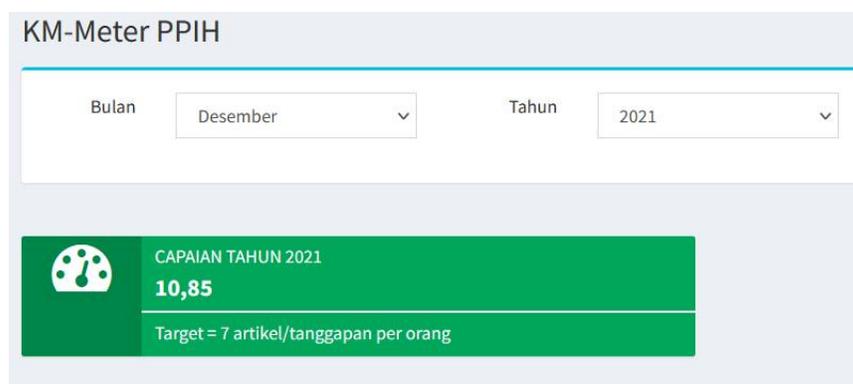
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target								Capaian terhadap Target Jangka Menengah
		2020		2021			2022	2023	2024	
		T	R	T	R	C	T	T	T	
1. Rata-rata indeks profesionalitas ASN PPIH	Indeks	Belum menjadi indikator		71	71	100,00%	73	76	80	88,75%

Sasaran Strategis 5 : Implementasi Aplikasi Knowledge Management secara optimal di PPIH.

Sasaran Strategis ini terdiri atas 1 (Satu) Indikator yaitu Rata-rata informasi yang dibagikan ke aplikasi Knowledge Management Intranet.

1. Indikator Rata-rata informasi yang dibagikan ke aplikasi Knowledge Management Intranet dengan target 6.

Realisasi rata-rata jumlah informasi yang diunggah oleh setiap pegawai di lingkungan Pusat Pemberdayaan Industri Halal ke aplikasi Knowledge Management pada tahun 2021 adalah sebesar 10,85. Hal ini menunjukkan bahwa capaian untuk IKU ini adalah sebesar 180,83 persen. Adapun apabila dibandingkan dengan target rata-rata 9 jumlah informasi pada akhir periode jangka menengah atau akhir tahun 2024 maka capaian pada tahun berjalan ini adalah sebesar 120,56 persen.



Gambar 3.1 KM-Meter PPIH Tahun 2021

Tabel 3.5

Capaian Sasaran Strategis Implementasi Aplikasi Knowledge Management secara optimal di PPIH

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target								Capaian terhadap Target Jangka Menengah
		2020		2021			2022	2023	2024	
		T	R	T	R	C	T	T	T	
1	Rata-rata informasi yang dibagikan ke aplikasi Knowledge Management Intranet	Informasi	Belum menjadi indikator	6	10,85	180,83%	7	8	9	120,56%

Sasaran Strategis 6 : Terwujudnya Organisasi dan Tata Laksana yang Tepat Fungsi, Tepat Proses dan Tepat Ukuran di PPIH.

Sasaran Strategis ini terdiri atas 1 (Satu) Indikator yaitu Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) PPIH.

1. Indikator Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) PPIH dengan target level 3.

Indeks penerapan Manajemen Risiko merupakan index untuk melihat sejauh mana penerapan prinsip-prinsip manajemen risiko telah diimplementasikan oleh suatu instansi. Dalam pelaksanaannya, tingkat penerapan prinsip-prinsip ini dinilai melalui Indeks Manajemen Risiko (MRI) dimana terdapat 5 (lima) level MRI, yaitu level 1, 2, 3, 4, dan 5. Masing-masing level tersebut mempunyai karakteristik masing-masing sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh BPKP. Level MRI dinilai dengan memperhatikan beberapa unsur dalam manajemen risiko, antara lain prinsip dan kerangka kerja manajemen risiko instansi, serta proses manajemen risiko di instansi tersebut.

Dalam implementasi manajemen risiko, dilakukan penilaian mandiri yang kemudian dilakukan penjaminan kualitas oleh Inspektorat Jenderal. Pada tahun 2021, berdasarkan hasil penjaminan kualitas diperoleh indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) di lingkungan Kementerian Perindustrian sebesar 2,62. Nilai tersebut merupakan nilai agregat pelaksanaan SPIP di lingkungan Kemenperin dan saat ini belum dilakukan penilaian mandiri di tingkat unit, oleh sebab itu capaian sasaran ini menggunakan nilai MRI tingkat Kementerian.

Dengan nilai MRI Kementerian sebesar 2,62, maka capaian indikator kinerja utama ini adalah sebesar 87,33 persen.

Tabel 3.6

Capaian Sasaran Strategis Terwujudnya Organisasi dan Tata Laksana yang Tepat Fungsi, Tepat Proses dan Tepat Ukuran di PPIH

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target								Capaian terhadap Target Jangka Menengah
		2020		2021			2022	2023	2024	
		T	R	T	R	C	T	T	T	
1	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) PPIH	Level	Belum menjadi indikator	3	2,62	87,33%	3	4	4	65,50%

Sasaran Strategis 7 : Terwujudnya Tata Kelola Keuangan, BMN, Sarana dan Prasarana PPIH yang Efektif dan Efisien.

Sasaran Strategis ini terdiri atas 1 (Satu) Indikator yaitu Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker.

1. Indikator Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker dengan target 91,5 persen.

Tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil pengawasan internal tidak hanya sekedar pemenuhan kewajiban yang bersifat administratif akan tetapi, tindak lanjut yang dilaksanakan oleh unit kerja/satker bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi. Melalui tindak lanjut tersebut, unit kerja secara otomatis telah melakukan perbaikan terhadap sistem maupun akuntabilitas organisasi. Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker dihitung melalui perbandingan rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi hasil pengawasan. Pada tahun 2021 Inspektorat Jenderal belum melaksanakan audit atas pelaksanaan kegiatan Pusat Pemberdayaan Industri Halal, namun pada tahun tersebut terdapat beberapa kegiatan yang memerlukan evaluasi dari pihak Inspektorat Jenderal seperti pelaksanaan penerapan SPIP, pelaksanaan revisi anggaran, dan penyusunan laporan keuangan. Dari pelaksanaan kegiatan tersebut ada beberapa rekomendasi dari APIP yang perlu ditindaklanjuti oleh PPIH. Untuk pelaksanaan penerapan SPIP rekomendasi yang telah ditindaklanjuti adalah sebesar 90 persen, untuk pelaksanaan revisi anggaran rekomendasi yang ditindaklanjuti sebesar 85 persen, dan untuk penyusunan laporan keuangan seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti atau 100 persen. Dengan demikian selama tahun 2021 rata-rata rekomendasi dari APIP yang telah ditindaklanjuti oleh PPIH adalah sebesar 91,67 persen. Apabila dibandingkan dengan targetnya yang sebesar 91,5 persen, maka capaian IKU ini untuk tahun 2021 adalah sebesar 100,19 persen.

LAPORAN AKUNTABILITAS KERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

Pada tahun 2024, indikator ini ditargetkan sebesar 93 persen sehingga capaian indikator ini terhadap target jangka menengahnya adalah sebesar 98,57 persen. Pusat Pemberdayaan Industri Halal akan berusaha untuk lebih memperhatikan rekomendasi hasil pengawasan internal agar target tersebut dapat tercapai.

Tabel 3.7

Capaian Sasaran Strategis Terwujudnya Tata Kelola Keuangan, BMN, Sarana dan Prasarana PPIH yang Efektif dan Efisien

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target								Capaian terhadap Target Jangka Menengah
		2020		2021			2022	2023	2024	
		T	R	T	R	C	T	T	T	
1. Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	Persen	Belum menjadi indikator		91,5	91,67	100,19%	92	92,5	93	98,57%

3.3. Akuntabilitas Keuangan Pusat Pemberdayaan Industri Halal Tahun 2021

Pagu anggaran awal Pusat Pemberdayaan Industri Halal pada tahun 2021 adalah sebesar Rp 6.100.000.000,- namun dengan adanya penambahan pagu selama tahun berjalan sehingga pagu anggaran akhir PPIH menjadi Rp 8.183.768.000,- (Delapan miliar seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dengan realisasi anggaran PPIH untuk tahun 2021 adalah sebesar Rp 7.203.867.118,- atau sebesar 88,03 persen. Rincian pagu dan realisasi anggaran per sasaran strategis dan indikator kinerja utama dapat dilihat pada Tabel 3.11.

Tabel 3.11

Pagu dan Realisasi Anggaran per Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Pagu (Rp)	Realisasi	
				(Rp)	(%)
1.	Meningkatnya Kinerja Industri Halal Dalam Negeri	1. Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di PPIH	258.700.000	258.692.820	100,00
		2. Tingkat sinergitas regulasi bidang industri halal	547.780.000	533.888.615	97,46
		3. Tingkat efektivitas pelaksanaan promosi dan kampanye industri halal	442.011.000	326.262.734	73,81
2.	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Industri Halal	1. Indeks tingkat pemahaman industri halal	3.657.194.000	3.250.366.892	88,88
3.	Meningkatnya Daya Saing Industri Dalam Negeri melalui Penguatan Ekosistem Industri Halal	1. Jumlah industri halal yang diberikan fasilitasi sertifikasi produk halal	708.372.000	695.168.189	98,14
		2. Tersedianya SDM industri halal yang profesional dan kompeten	158.480.000	158.202.000	99,82
4.	Meningkatnya Kinerja ASN dan Efektivitas Organisasi PPIH	1. Rata-rata indeks profesionalitas ASN PPIH	81.780.000	50.186.000	61,37
5.	Implementasi Aplikasi Knowledge Management secara optimal di PPIH	1. Rata-rata informasi yang dibagikan ke aplikasi Knowledge Management Intranet	92.000.000	50.985.000	55,42
6.	Terwujudnya Organisasi dan Tata Laksana yang Tepat Fungsi, Tepat Proses dan Tepat Ukuran di PPIH	1. Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) PPIH	48.584.000	22.539.574	46,39
7.	Terwujudnya Tata Kelola Keuangan, BMN, Sarana dan Prasarana PPIH yang Efektif dan Efisien	1. Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	2.188.867.000	1.857.575.294	84,86
TOTAL			8.183.768.000	7.203.867.118	88,03

3.4. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Pusat Pemberdayaan Industri Halal berusaha memaksimalkan pencapaian kinerja, baik terhadap output, maupun outcome. Adapun salah satu upaya dalam memaksimalkan capaian tersebut adalah melaksanakan efisiensi sumber daya, agar sumber daya yang tersedia dapat digunakan secara efektif untuk mencapai target kinerja dan pelayanan sesuai tugas dan fungsi pada unit kerja.

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan secara umum terdiri atas dua, yaitu efisiensi sumber daya biaya atau anggaran dan sumber daya manusia.

LAPORAN AKUNTABILITAS KERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

Pada tahun 2021 realisasi anggaran yang dicapai adalah sebesar Rp7.203.867.118,- sementara target anggaran untuk pelaksanaan seluruh kegiatan adalah Rp8.183.768.000,- sehingga capaian realisasi anggarannya adalah 88,03 persen. Adapun seluruh komponen kegiatan telah terlaksana atau mencapai realisasi 100 persen, dengan demikian efisiensi sumber daya anggaran pada tahun 2020 tersebut adalah sebesar 11,97%.

Dari sisi sumber daya manusia, upaya efisiensi telah dilaksanakan melalui pelibatan pihak-pihak lain dalam pengelolaan kegiatan seperti penggunaan jasa pihak ke-3 dalam pelaksanaan kegiatan, penggunaan tenaga ahli dari perguruan tinggi sebagai narasumber, maupun bekerja sama dengan lembaga/instansi pemerintah. Hal ini tidak terlepas dari kondisi sumber daya manusia PPIH yang terbatas yaitu 18 orang PNS dan 4 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), sehingga dengan melibatkan pihak-pihak lain PPIH mampu menyelesaikan tugas fungsi dan kegiatan yang harus dilaksanakan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Secara umum, selama tahun 2021 Pusat Pemberdayaan Industri Halal telah melakukan kegiatan dengan cukup baik. Ini diukur melalui capaian 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan. Berdasarkan analisis capaian kinerja Pusat Pemberdayaan Industri Halal 2021 dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan Pusat Pemberdayaan Industri Halal tahun 2021 dilaksanakan berdasarkan penetapan kinerja dan dapat dicapai dengan baik.
2. Pusat Pemberdayaan Industri Halal memiliki 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Utama (IKU) dimana terdapat 1 indikator yang belum mencapai target.
3. Selama tahun 2021 penyerapan anggaran Pusat Pemberdayaan Industri Halal sebesar 88,03 persen atau Rp7.203.867.118,- dari total anggaran Rp8.183.768.000.

4.2. Permasalahan dan Kendala

Beberapa kendala yang dihadapi Pusat Pemberdayaan Industri Halal dalam melaksanakan kegiatan dan pencapaian kinerja antara lain:

1. Sebagai unit yang baru perlu pembentukan tim pengelola keuangan maupun persiapan administrasi lainnya sehingga pelaksanaan anggaran hanya efektif dapat dilaksanakan selama empat bulan.
2. Masih adanya Pandemi covid-19 mengakibatkan pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakan dalam kantor harus dilakukan secara bergantian. Kegiatan secara fisik dialihkan menjadi kegiatan jarak jauh atau online menggunakan aplikasi. Perubahan proses kerja menjadi sistem online membutuhkan penyesuaian bagi unit atau satuan kerja termasuk para pengelola keuangan. Hal tersebut terkadang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan.
3. Penambahan pagu anggaran yang diterima pada pertengahan bulan Desember mengakibatkan waktu yang dimiliki PPIH untuk pelaksanaan anggaran tersebut sangat terbatas.

4.3. Tindak Lanjut

Tindak lanjut yang perlu diambil oleh Pusat Pemberdayaan Industri Halal dalam rangka mengoptimalkan kelancaran pelaksanaan kegiatan dan peningkatan kinerja pada tahun selanjutnya antara lain:

1. Melakukan penyesuaian pola kerja sesuai kebiasaan normal baru dan mengutamakan terlaksananya protokol kesehatan namun tetap tidak mengesampingkan tercapainya output kegiatan;
2. Melakukan evaluasi kegiatan, terutama kegiatan yang akan dilaksanakan kembali pada tahun berikutnya, untuk mempertimbangkan waktu persiapan dan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan tersebut pada waktu yang akan datang;
3. Membuat perencanaan jadwal pelaksanaan kegiatan yang matang beserta rencana penarikan anggaran serta disiplin dalam menjalankan kegiatan dan membuat pertanggungjawaban keuangan sesuai jadwal yang sudah direncanakan;
4. Mempercepat realisasi jadwal pelaksanaan kegiatan yang menyerap anggaran besar;
5. Memberikan pelatihan atau bimbingan teknis bagi pegawai yang mampu meningkatkan kompetensi SDM PPIH.

LAMP IRAN

LAPORAN AKUNTABILITAS KERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

KODE	OUTPUT / RINCIAN AKUN	PAGU	REALISASI	
			Rp	%
WA	Program Dukungan Manajemen	8.183.768.000	7.203.867.118	88,03
6561	Pengembangan Industri Produk Halal	8.183.768.000	7.203.867.118	88,03
6561.ABK	Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri Dan Umkm	547.780.000	533.888.615	97,46
1	Kajian Indeks Pembinaan Dan Pemberdayaan Industri Halal	335.126.000	325.927.194	97,26
51	Penyusunan Kajian Tentang Pengembangan, Fasilitasi, Dan Pembinaan Industri Halal	335.126.000	325.927.194	97,26
A	Tanpa Sub Komponen	335.126.000	325.927.194	97,26
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	32.700.000	30.450.000	93,12
	- Honorarium Pengarah Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan Dengan Sk Es. 1)	4.500.000	2.250.000	50
	- Honorarium Penanggung Jawab Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan Dengan Sk Es. 1)	4.200.000	4.200.000	100
	- Honorarium Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan Dengan Sk Es. 1)	3.900.000	3.900.000	100
	- Honorarium Wakil Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan Dengan Sk Es. 1)	3.600.000	3.600.000	100
	- Honorarium Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan Dengan Sk Es. 1)	3.000.000	3.000.000	100
	- Honorarium Anggota Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan Dengan Sk Es. 1)	13.500.000	13.500.000	100
522151	Belanja Jasa Profesi	66.000.000	65.400.000	99,09
	- Narasumber Fgd Penyusunan Rpermenperin Indeks Pembinaan Dan Pemberdayaan Industri Halal	66.000.000	65.400.000	99,09
522191	Belanja Jasa Lainnya	185.416.000	185.072.800	99,81
	- Pelaksanaan Fgd Penyusunan Kebijakan Industri Halal Dan Indeks Industri Halal	185.416.000	185.072.800	99,81
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi Covid-19	2.400.000	1.623.000	67,63
	- Tes Swab Antigen Dalam Rangka Perjalanan Dinas	2.400.000	1.623.000	67,63
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	27.310.000	22.271.994	81,55
	<u>Dalam Rangka Penyusunan Kajian Indeks Pembinaan Dan Pemberdayaan Industri Halal</u>			
	<u>Jakarta - Semarang (2 Org X 3 Hari X 1 Kali)</u>			
	- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (pp) Ekonomi Jakarta - Semarang	4.360.000	2.111.200	48,42
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (jawa Tengah)	1.110.000	1.110.000	100
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon Iv/golongan Iii (jawa Tengah)	2.400.000	2.145.894	89,41
	- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (d.k.i. Jakarta)	500.000	146.605	29,32
	- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (jawa Tengah)	180.000	0	0
	<u>Jakarta - Bandar Lampung (1 Orang X 3 Hari X 1 Kali)</u>			
	- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (pp) Ekonomi Jakarta - Bandar Lampung	1.300.000	1.128.400	86,8
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (lampung)	1.140.000	1.140.000	100
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon Iv/golongan Iii (lampung)	1.160.000	1.160.000	100
	- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (d.k.i. Jakarta)	500.000	499.000	99,8
	- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (lampung)	160.000	0	0
	<u>Jakarta - Pekanbaru (2 Orang X 3 Hari X 1 Kali)</u>			
	- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (pp) Ekonomi Jakarta - Pekanbaru	6.030.000	5.635.000	93,45
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (riau)	2.220.000	2.220.000	100
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon Iii/golongan Iv (r I A U)	3.200.000	2.310.000	72,19
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon Iv/golongan Iii (r I A U)	1.690.000	1.690.000	100
	- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (d.k.i. Jakarta)	1.000.000	975.895	97,59
	- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (riau)	360.000	0	0

LAPORAN AKUNTABILITAS KERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

KODE	OUTPUT / RINCIAN AKUN	PAGU	REALISASI	
			Rp	%
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	21.300.000	21.109.400	99,11
	<u>Fgd Penyusunan Kebijakan</u>			
	- Transportasi Jakarta-cirebon	12.300.000	12.109.400	98,45
	- Uang Harian	9.000.000	9.000.000	100
2	Rekomendasi Kebijakan Tentang Panduan Pembinaan Dan Pernerdayaan Industri Halal	212.654.000	207.961.421	97,79
51	<u>Penyusunan Kebijakan Tentang Pengembangan, Fasilitas, Dan Pembinaan Industri Halal</u>	212.654.000	207.961.421	97,79
A	Tanpa Sub Komponen	212.654.000	207.961.421	97,79
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	31.200.000	31.200.000	100
	- Honorarium Pengarah Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan Dengan Sk Es. 1)	4.500.000	4.500.000	100
	- Honorarium Penanggung Jawab Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan Dengan Sk Es. 1)	4.200.000	4.200.000	100
	- Honorarium Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan Dengan Sk Es. 1)	3.900.000	3.900.000	100
	- Honorarium Wakil Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan Dengan Sk Es. 1)	3.600.000	3.600.000	100
	- Honorarium Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan Dengan Sk Es. 1)	3.000.000	3.000.000	100
	- Honorarium Anggota Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan Dengan Sk Es. 1)	12.000.000	12.000.000	100
522151	Belanja Jasa Profesi	13.000.000	12.300.000	94,62
	- Honorarium Narasumber	13.000.000	12.300.000	94,62
522191	Belanja Jasa Lainnya	136.744.000	136.467.100	99,8
	- Pelaksanaan Fgd Penyusunan Kebutuhan Panduan Dalam Pelaksanaan Kebijakan Industri Halal	136.744.000	136.467.100	99,8
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	16.310.000	13.144.600	80,59
	<u>Dalam Rangka Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Tentang Panduan Pembinaan Dan Pernerdayaan Industri Halal Cirebon (1 Orang X 3 Hari X 1 Kali)</u>			
	- Satuan Biaya Transportasi Jakarta Ke Cirebon (pp)	300.000	293.500	97,83
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (jawa Barat)	1.290.000	1.010.000	78,29
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon Iv/golongan Iii (jawa Barat)	1.140.000	1.140.000	100
	<u>Jakarta - Bandung</u>			
	- Satuan Biaya Transportasi Jakarta Ke Bandung (pp)	2.400.000	1.442.500	60,1
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (jawa Barat)	5.160.000	4.610.000	89,34
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon Iv/golongan Iii (jawa Barat)	4.560.000	3.431.600	75,25
	<u>Jakarta - Bogor</u>			
	- Satuan Biaya Transportasi Jakarta Ke Bogor (pp)	600.000	357.000	59,5
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (jawa Barat)	860.000	860.000	100
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	15.400.000	14.849.721	96,43
	<u>Pelaksanaan Fgd Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Tentang Panduan Pembinaan Dan Pernerdayaan Industri Halal</u>			
	- Transportasi Jakarta-bandung	9.100.000	8.549.721	93,95
	- Uang Harian	6.300.000	6.300.000	100
6561.AEH	Promosi	4.191.205.000	3.627.614.626	86,55
1	Promosi Dan Pendampingan Penerapan Industri Halal	442.011.000	326.262.734	73,81
51	<u>Promosi Dan Pendampingan Penerapan Industri Halal</u>	442.011.000	326.262.734	73,81
A	Tanpa Sub Komponen	442.011.000	326.262.734	73,81
521211	Belanja Bahan	10.332.000	9.252.500	89,55
	- Konsumsi Rapat	5.520.000	4.467.500	80,93

LAPORAN AKUNTABILITAS KERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

KODE	OUTPUT / RINCIAN AKUN	PAGU	REALISASI	
			Rp	%
521213	- Penggandaan Bahan Dan Penjilidan Laporan	4.812.000	4.785.000	99,44
	Belanja Honor Output Kegiatan	29.700.000	29.700.000	100
	- Honorarium Penanggung Jawab Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan Dengan Sk Es. 1)	4.200.000	4.200.000	100
	- Honorarium Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan Dengan Sk Es. 1)	3.900.000	3.900.000	100
	- Honorarium Wakil Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan Dengan Sk Es. 1)	3.600.000	3.600.000	100
	- Honorarium Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan Dengan Sk Es. 1)	3.000.000	3.000.000	100
522151	- Honorarium Anggota Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan Dengan Sk Es. 1)	15.000.000	15.000.000	100
	Belanja Jasa Profesi	21.400.000	0	0
	- Narasumber Pembahas	20.000.000	0	0
522191	- Moderator	1.400.000	0	0
	Belanja Jasa Lainnya	182.000.000	181.115.000	99,51
522192	- Penyusunan Video Promosi Industri Halal	135.000.000	134.585.000	99,69
	- Peluncuran Program Fasilitas Halal	47.000.000	46.530.000	99
	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi Covid-19	28.000.000	18.084.000	64,59
524111	- Test Covid-19 Pegawai	28.000.000	18.084.000	64,59
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	164.819.000	83.181.234	50,47
	<u>Dalam Rangka Promosi Dan Pendampingan Penerapan Industri Halal</u>			
	<u>Tangerang</u>			
	- Biaya Transportasi Jakarta - Tangerang Pp	3.100.000	1.863.700	60,12
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (banten)	5.550.000	5.550.000	100
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon Iii (banten)	7.180.000	1.077.000	15
	<u>Bogor</u>			
	- Biaya Transportasi Jakarta - Bogor Pp	1.200.000	588.500	49,04
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (jawa Barat)	2.580.000	1.720.000	66,67
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon Iii (j A W A B A R A T)	2.280.000	342.000	15
	<u>Bandung</u>			
	- Biaya Transportasi Jakarta - Bandung Pp	3.000.000	943.000	31,43
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (jawa Barat)	5.160.000	5.160.000	100
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon Iii (j A W A B A R A T)	4.560.000	3.341.927	73,29
	<u>Bekasi</u>			
	- Biaya Transportasi Jakarta - Bekasi Pp	2.272.000	319.727	14,07
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (jawa Barat)	3.440.000	1.720.000	50
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon Iii (j A W A B A R A T)	2.280.000	342.000	15
	<u>Solo</u>			
	- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (pp) Ekonomi Jakarta - Solo	4.684.000	0	0
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (jawa Tengah)	2.220.000	0	0
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon Iii (jawa Tengah)	1.944.000	0	0
	- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (d.k.i. Jakarta)	1.024.000	0	0
	- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (jawa Tengah)	300.000	0	0
	<u>Yogyakarta</u>			
	- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (pp) Ekonomi Jakarta - Jogjakarta	4.536.000	2.455.325	54,13
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (d.i. Yogyakarta)	2.520.000	2.520.000	100

LAPORAN AKUNTABILITAS KERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

KODE	OUTPUT / RINCIAN AKUN	PAGU	REALISASI	
			Rp	%
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon Iii (d.i. Yogyakarta)	3.380.000	2.796.000	82,72
	- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (d.k.i. Jakarta)	1.024.000	778.000	75,98
	- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (d.i. Yogyakarta)	472.000	0	0
	<u>Batam</u>			
	- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (pp) Ekonomi Jakarta - Batam	5.776.000	0	0
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (keulauan Riau)	2.220.000	0	0
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon Iii/golongan Iv (keulauan Riau)	4.148.000	0	0
	- Biaya Taksi Perjalanan Dinas	548.000	0	0
	<u>Surabaya</u>			
	- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (pp) Ekonomi Jakarta - Surabaya	5.348.000	0	0
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (jawa Timur)	2.460.000	0	0
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon Iv/golongan Iii (jawa Timur)	2.656.000	0	0
	- Biaya Taksi Perjalanan Dinas	776.000	0	0
	<u>Makassar</u>			
	- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (pp) Ekonomi Jakarta - Makassar	7.538.000	0	0
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (sulawesi Selatan)	2.580.000	0	0
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon Iv/golongan Iii (sulawesi Selatan)	2.928.000	0	0
	- Biaya Taksi Perjalanan Dinas	580.000	0	0
	<u>Padang</u>			
	- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (pp) Ekonomi Jakarta - Padang	11.808.000	11.808.000	100
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (sumatera Barat)	4.560.000	4.560.000	100
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon Iv/golongan Iii (sumatera Barat)	5.200.000	5.200.000	100
	- Biaya Taksi Perjalanan Dinas	3.568.000	2.421.905	67,88
	<u>Pontianak</u>			
	- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (pp) Ekonomi Jakarta - Pontianak	8.343.000	8.318.950	99,71
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (kalimantan Barat)	3.420.000	1.050.000	30,7
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon Iv/golongan Iii (kalimantan Barat)	3.228.000	1.696.000	52,54
	- Biaya Taksi Perjalanan Dinas	2.376.000	0	0
	<u>Mataram</u>			
	- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (pp) Ekonomi Jakarta - Mataram	9.690.000	9.409.200	97,1
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (nusa Tenggara Barat)	3.960.000	3.440.000	86,87
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon Iv/golongan Iii (nusa Tenggara Barat)	3.480.000	2.472.000	71,03
	- Biaya Taksi Perjalanan Dinas	2.922.000	1.288.000	44,08
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.760.000	4.930.000	85,59
	- Transport Lokal	2.400.000	2.190.000	91,25
	- Uang Harian	3.360.000	2.740.000	81,55
2	Industri Halal Award	3.657.194.000	3.250.366.892	88,88
51	Penyelenggaraan Industri Halal Award	3.657.194.000	3.250.366.892	88,88
A	Tanpa Sub Komponen	3.657.194.000	3.250.366.892	88,88
521211	Belanja Bahan	326.958.000	287.963.000	88,07
	- Konsumsi Rapat	6.900.000	6.887.000	99,81

LAPORAN AKUNTABILITAS KERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

KODE	OUTPUT / RINCIAN AKUN	PAGU	REALISASI	
			Rp	%
	- Penggandaan Bahan Dan Penjilidan Laporan	8.286.000	8.271.000	99,82
	- Belanja Bahan Buku	10.000.000	1.007.500	10,08
	<u>Dalam Rangka Pelaksanaan Ihya 2021</u>			
	- Goodie Bag Acara Puncak Ihya 2021	85.000.000	85.000.000	100
	- Seminar Kit Ihya Tahap 1	15.000.000	0	0
	- Piala Penghargaan Industri Halal	110.750.000	100.750.000	90,97
	- Perlengkapan Panitia	25.000.000	24.915.000	99,66
	- Pembutan Baliho, Neon Box, Umbul-umbul Dan Poster Ihya 2021	66.022.000	61.132.500	92,59
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	34.200.000	31.950.000	93,42
	- Honorarium Pengarah Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan Dengan Sk Es. 1)	4.500.000	2.450.000	54,44
	- Honorarium Penanggung Jawab Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan Dengan Sk Es. 1)	4.200.000	4.200.000	100
	- Honorarium Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan Dengan Sk Es. 1)	3.900.000	3.900.000	100
	- Honorarium Wakil Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan Dengan Sk Es. 1)	3.600.000	3.600.000	100
	- Honorarium Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan Dengan Sk Es. 1)	3.000.000	3.000.000	100
	- Honorarium Anggota Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan Dengan Sk Es. 1)	15.000.000	14.800.000	98,67
522151	Belanja Jasa Profesi	70.000.000	7.400.000	10,57
	<u>Penyusunan Aspek Penilaian</u>			
	- Honorarium Narasumber/pembahas	56.000.000	7.400.000	13,21
	<u>On Site Evaluation (penjurian)</u>			
	- Narasumber / Pembahas (1 Orang X 2 Jam X 5 Lokasi)	14.000.000	0	0
522191	Belanja Jasa Lainnya	2.629.000.000	2.526.192.900	96,09
	- Kick Off Indonesia Halal Industry Awards 2021	58.000.000	57.695.000	99,47
	- Pembuatan Desain Logo Dan Trophy Indonesia Halal Industry Awards 2021	130.000.000	129.910.000	99,93
	- Sosialisasi Indonesia Halal Industri Awards 2021 Di Jawa Timur	120.000.000	101.200.000	84,33
	- Sosialisasi Indonesia Halal Industri Awards 2021 Di Sulawesi Selatan	155.000.000	150.638.400	97,19
	- Sosialisasi Indonesia Halal Industri Awards 2021 Di Banten	120.000.000	113.289.000	94,41
	- Pelaksanaan Penjurian Tahap I Di Bandung	200.000.000	192.060.000	96,03
	- Pelaksanaan Penjurian Tahap Ii Di Jakarta	200.000.000	194.524.000	97,26
	- Penilaian Akhir Indonesia Halal Industry Award 2021	146.000.000	145.420.000	99,6
	- Sewa Peralatan Multimedia	200.000.000	199.980.000	99,99
	- Pengelola Acara Penganugerahan Ihya 2021	200.000.000	199.045.000	99,52
	- Pengisi Acara Ihya 2021	200.000.000	192.764.000	96,38
	- Promosi Media Online	100.000.000	98.780.000	98,78
	- Fashion Show Modest Fahion	200.000.000	152.350.000	76,18
	- Pembuatan Desain Multimedia Ihya 2021	200.000.000	199.650.000	99,83
	- Pembuatan Panggung Ihya 2021	200.000.000	199.292.500	99,65
	- Sewa Peralatan Utilitas Dan Kelistrikan	200.000.000	199.595.000	99,8
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi Covid-19	40.500.000	39.580.000	97,73
	- Test Covid-19 Pegawai	10.500.000	9.605.000	91,48
	- Test Covid-19 Penganugerahan	30.000.000	29.975.000	99,92
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	311.656.000	168.998.431	54,23
	<u>Sosialisasi Di Jawa Timur</u>			
	- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (pp) Ekonomi Jakarta - Surabaya	21.392.000	20.492.602	95,8

LAPORAN AKUNTABILITAS KERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

KODE	OUTPUT / RINCIAN AKUN	PAGU	REALISASI	
			Rp	%
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (jawa Timur)	9.840.000	9.830.000	99,9
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon Iii (jawa Timur)	10.624.000	9.494.639	89,37
	- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (d.k.i. Jakarta)	4.096.000	3.084.945	75,32
	- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (jawa Timur)	3.104.000	476.000	15,34
	<u>Sosialisasi Di Sulawesi Selatan</u>			
	- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (pp) Ekonomi Jakarta - Makassar	30.632.000	26.545.185	86,66
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (sulawesi Selatan)	10.320.000	9.476.000	91,82
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon Iv/golongan Iii (sulawesi Selatan)	11.712.000	11.712.000	100
	- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (d.k.i. Jakarta)	4.096.000	2.407.620	58,78
	- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (sulawesi Selatan)	2.320.000	738.800	31,84
	<u>Sosialisasi Di Banten</u>			
	- Biaya Transportasi Jakarta - Tangerang Pp	3.720.000	235.500	6,33
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (banten)	6.660.000	2.275.000	34,16
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon Iii (banten)	8.616.000	2.500.000	29,02
	<u>Penjurian (on Site Evaluation)</u>			
	<u>Bekasi - Cikarang</u>			
	- Biaya Transportasi Jakarta - Bekasi Pp	7.668.000	0	0
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (jawa Barat)	19.350.000	550.000	2,84
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon Iii (j A W A B A R A T)	17.100.000	0	0
	<u>Batam</u>			
	- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (pp) Ekonomi Jakarta - Batam	8.664.000	0	0
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (kepulauan Riau)	3.330.000	0	0
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon Iii (kepulauan Riau)	6.222.000	0	0
	- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (kepulauan Riau)	822.000	0	0
	<u>Tangerang</u>			
	- Biaya Transportasi Jakarta - Tangerang Pp	3.720.000	1.599.940	43,01
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (banten)	7.740.000	3.335.000	43,09
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon Iii (banten)	8.616.000	1.412.000	16,39
	<u>Surabaya</u>			
	- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (pp) Ekonomi Jakarta - Surabaya	16.044.000	4.923.900	30,69
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (jawa Timur)	7.380.000	2.520.000	34,15
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon Iii (jawa Timur)	7.968.000	2.514.300	31,55
	- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (d.k.i. Jakarta)	3.072.000	1.435.000	46,71
	- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (jawa Timur)	2.328.000	0	0
	<u>Pelaksanaan Acara Ihya</u>			
	<u>Jakarta</u>			
	- Biaya Transportasi Dalam Kota	9.000.000	8.700.000	96,67
	- Uang Harian Dalam Kota Lebih Dari 8 Jam Selama 2 Hari	12.600.000	12.490.000	99,13
	- Uang Harian Halfday 1 Hari	3.900.000	2.650.000	67,95
	- Biaya Penginapan	39.000.000	27.600.000	70,77
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.880.000	2.460.000	85,42
	- Transport Lokal	1.200.000	900.000	75
	- Uang Harian	1.680.000	1.560.000	92,86
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	242.000.000	185.822.561	76,79

LAPORAN AKUNTABILITAS KERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

KODE	OUTPUT / RINCIAN AKUN	PAGU	REALISASI	
			Rp	%
	<u>Penganugerahan Halal Award (ihia 2021)</u>			
	- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/kota Pergi Pulang (pp)	22.500.000	4.330.000	19,24
	- Uang Harian Fullday/halfday Di Luar Kota/di Dalam Kota D.k.i. Jakarta	19.500.000	7.730.000	39,64
	- Biaya Paket Kegiatan Rapat/pertemuan Full Day Di Luar Kantor - Menteri Setingkat Menteri (d.k.i. Jakarta)	200.000.000	173.762.561	86,88
3	Website Industri Halal	92.000.000	50.985.000	55,42
51	Pengembangan Website Industri Halal	92.000.000	50.985.000	55,42
A	Tanpa Sub Komponen	92.000.000	50.985.000	55,42
521211	Belanja Bahan	2.000.000	1.980.000	99
	- Penggandaan Bahan Dan Penjilidan Laporan	2.000.000	1.980.000	99
522191	Belanja Jasa Lainnya	90.000.000	49.005.000	54,45
	- Pembuatan Website Industri Halal	50.000.000	49.005.000	98,01
	- Penyusunan Studi Awal Pengembangan Sistem Informasi Industri Halal	40.000.000	0	0
6561.BDI	Fasilitas Dan Pembinaan Industri	866.852.000	853.370.189	98,44
1	Fasilitasi Dan Pembinaan Industri Halal	866.852.000	853.370.189	98,44
51	Fasilitasi Industri Halal	866.852.000	853.370.189	98,44
A	Tanpa Sub Komponen	866.852.000	853.370.189	98,44
521211	Belanja Bahan	10.010.000	10.000.000	99,9
	- Konsumsi Rapat	10.010.000	10.000.000	99,9
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	29.700.000	29.700.000	100
	- Honorarium Penanggung Jawab Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan Dengan Sk Es. 1)	4.200.000	4.200.000	100
	- Honorarium Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan Dengan Sk Es. 1)	3.900.000	3.900.000	100
	- Honorarium Wakil Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan Dengan Sk Es. 1)	3.600.000	3.600.000	100
	- Honorarium Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan Dengan Sk Es. 1)	3.000.000	3.000.000	100
	- Honorarium Anggota Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan Dengan Sk Es. 1)	15.000.000	15.000.000	100
522131	Belanja Jasa Konsultan	45.000.000	44.825.000	99,61
	- Penyusunan Bahan Ajar Penerapan Halal Bagi Sektor Industri Manufaktur	45.000.000	44.825.000	99,61
522151	Belanja Jasa Profesi	14.400.000	14.200.000	98,61
	- Honorarium Narasumber (pejabat Eselon Ii)	14.400.000	14.200.000	98,61
522191	Belanja Jasa Lainnya	672.764.000	670.497.000	99,66
	- Pelatihan Dan Sertifikasi Kompetensi Penyelia Halal	158.480.000	158.202.000	99,82
	- Pelaksanaan Webinar	30.000.000	30.000.000	100
	- Pelatihan Dan Pendampingan Sertifikasi Produk Halal Di Jawa Barat	124.000.000	123.365.000	99,49
	- Pelatihan Dan Pendampingan Sertifikasi Produk Halal Di Jawa Tengah	124.000.000	123.365.000	99,49
	- Pendampingan Dan Sertifikasi Produk Halal Di Jawa Timur	124.000.000	123.365.000	99,49
	- Fgd Pembahasan Persiapan Pembentukan Lph Dan Sertifikasi Halal 2022	112.284.000	112.200.000	99,93
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	92.698.000	81.868.189	88,32
	<u>Dalam Rangka Fasilitasi Dan Pembinaan Industri Halal</u>			
	<u>Bogor</u>			
	- Biaya Transportasi Jakarta - Bogor Pp	1.506.000	404.000	26,83
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (jawa Barat)	2.580.000	860.000	33,33
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon Iv/golongan Iii (jawa Barat)	171.000	171.000	100
	<u>Bandung</u>			
	- Biaya Transportasi Jakarta - Bandung Pp	3.000.000	2.456.122	81,87

LAPORAN AKUNTABILITAS KERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

KODE	OUTPUT / RINCIAN AKUN	PAGU	REALISASI	
			Rp	%
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (jawa Barat)	15.050.000	13.760.000	91,43
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon Iv/golongan Iii (jawa Barat)	9.500.000	8.299.573	87,36
	<u>Lampung (2 Orang X 3 Hari X 1 Kali)</u>			
	- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (pp) Ekonomi Jakarta - Bandar Lampung	2.712.000	2.665.800	98,3
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (lampung)	2.280.000	2.280.000	100
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon Iv/golongan Iii (lampung)	1.700.000	1.700.000	100
	- Biaya Taksi Perjalanan Dinas	800.000	792.720	99,09
	<u>Palembang (2 Orang X 3 Hari X 1 Kali)</u>			
	- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (pp) Ekonomi Jakarta - Palembang	3.408.000	3.407.800	99,99
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (sumatera Selatan)	2.280.000	2.280.000	100
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon Iv/golongan Iii (sumatera Selatan)	2.168.000	2.164.709	99,85
	- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (d.k.i. Jakarta)	1.000.000	981.000	98,1
	<u>Surabaya (2 Orang X 3 Hari X 1 Kali)</u>			
	- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (pp) Ekonomi Jakarta - Surabaya	5.302.000	4.994.400	94,2
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (jawa Timur)	2.460.000	2.460.000	100
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon Iv/golongan Iii (jawa Timur)	2.656.000	2.656.000	100
	- Biaya Taksi Perjalanan Dinas	1.624.000	713.001	43,9
	<u>Cirebon (2 Orang X 3 Hari X 1 Kali)</u>			
	- Biaya Transportasi Jakarta - Cirebon Pp	346.000	346.000	100
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (jawa Barat)	2.022.000	2.020.000	99,9
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon Iv/golongan Iii (jawa Barat)	2.280.000	2.280.000	100
	<u>Semarang (2 Orang X 3 Hari X 1 Kali)</u>			
	- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (pp) Ekonomi Jakarta - Semarang	2.867.000	2.864.400	99,91
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (jawa Tengah)	2.220.000	2.220.000	100
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon Iv/golongan Iii (jawa Tengah)	1.840.000	1.840.000	100
	- Biaya Taksi Perjalanan Dinas	762.000	762.000	100
	<u>Banjarmasin (2 Orang X 3 Hari X 1 Kali)</u>			
	- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (pp) Ekonomi Jakarta - Banjarmasin	5.724.000	5.722.600	99,98
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (kalimantan Selatan)	2.280.000	2.280.000	100
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon Iv/golongan Iii (kalimantan Selatan)	1.636.000	1.633.064	99,82
	- Biaya Taksi Perjalanan Dinas	1.144.000	1.144.000	100
	<u>Depok</u>			
	- Biaya Transportasi Jakarta - Depok Pp	600.000	0	0
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (jawa Barat)	1.720.000	0	0
	<u>Jakarta</u>			
	- Biaya Transportasi Dalam Kota	3.000.000	2.700.000	90
	- Uang Harian Fullday Jakarta	2.600.000	2.600.000	100
	- Biaya Penginapan	1.460.000	410.000	28,08
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.280.000	2.280.000	100
	- Transport Lokal	1.650.000	1.650.000	100
	- Uang Harian	630.000	630.000	100

LAPORAN AKUNTABILITAS KERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

KODE	OUTPUT / RINCIAN AKUN	PAGU	REALISASI	
			Rp	%
6561.EAA	Layanan Perkantoran	2.146.187.000	1.850.815.294	86,24
1	Layanan Perkantoran	2.146.187.000	1.850.815.294	86,24
1	Gaji Dan Tunjangan	1.248.260.000	1.057.287.252	84,7
A	Tanpa Sub Komponen	1.248.260.000	1.057.287.252	84,7
511111	Belanja Gaji Pokok Pns	378.130.000	258.924.900	68,48
	- Belanja Gaji Pokok Pns	378.130.000	258.924.900	68,48
511119	Belanja Pembulatan Gaji Pns	30.000	3.785	12,62
	- Belanja Pembulatan Gaji Pns	30.000	3.785	12,62
511121	Belanja Tunj. Suami/istri Pns	25.130.000	17.798.820	70,83
	- Belanja Tunj. Suami/istri Pns	25.130.000	17.798.820	70,83
511122	Belanja Tunj. Anak Pns	9.090.000	5.563.952	61,21
	- Belanja Tunj. Anak Pns	9.090.000	5.563.952	61,21
511123	Belanja Tunj. Struktural Pns	43.595.000	30.280.000	69,46
	- Belanja Tunj. Struktural Pns	43.595.000	30.280.000	69,46
511124	Belanja Tunj. Fungsional Pns	13.000.000	9.864.000	75,88
	- Belanja Tunj. Fungsional Pns	13.000.000	9.864.000	75,88
511125	Belanja Tunj. Pph Pns	4.600.000	4.567.216	99,29
	- Belanja Tunj. Pph Pns	4.600.000	4.567.216	99,29
511126	Belanja Tunj. Beras Pns	20.785.000	14.411.580	69,34
	- Belanja Tunj. Beras Pns	20.785.000	14.411.580	69,34
511129	Belanja Uang Makan Pns	86.400.000	66.317.000	76,76
	- Belanja Uang Makan Pns	86.400.000	66.317.000	76,76
511151	Belanja Tunjangan Umum Pns	7.500.000	4.460.000	59,47
	- Belanja Tunjangan Umum Pns	7.500.000	4.460.000	59,47
512411	Belanja Pegawai (tunjangan Khusus/kegiatan/kinerja)	660.000.000	645.095.999	97,74
	- Tunjangan Kinerja Pegawai	660.000.000	645.095.999	97,74
2	Operasional Dan Pemeliharaan Kantor	897.927.000	793.528.042	88,37
A	Operasional Dan Pemeliharaan Kantor	897.927.000	793.528.042	88,37
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	188.389.000	188.113.478	99,85
	- Keperluan Sehari-hari Perkantoran Kurang 40 Pegawai (dki Jakarta)	50.000.000	49.947.378	99,89
	- Honorarium Petugas Kebersihan Dan Pramubakti D.k.i. Jakarta	89.205.000	89.205.000	100
	- Honorarium Satpam Dan Pengemudi D.k.i. Jakarta	30.984.000	30.984.000	100
	- Jamuan Tamu	6.700.000	6.640.000	99,1
	- Pengadaan Inventaris Kantor	11.000.000	10.837.100	98,52
	- Biaya Administrasi Elektronik Perbankan	500.000	500.000	100
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	100.000	88.000	88
	- Pembelian Benda Pos Dan Surat Menyurat Kantor Pusat	100.000	88.000	88
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	57.160.000	54.804.000	95,88
	- Honorarium Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (pagu Dana Di Atas Rp5 Miliar S.d. Rp10 Miliar)	15.540.000	14.920.000	96,01
	- Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (pagu Dana Di Atas Rp5 Miliar S.d. Rp10 Miliar)	15.120.000	14.500.000	95,9
	- Honorarium Pejabat Penguji Tagihan Penandatanganan Spm (pagu Dana Di Atas Rp5 Miliar S.d. Rp10 Miliar)	2.000.000	1.892.000	94,6
	- Honorarium Bendahara Pengeluaran (pagu Dana Di Atas Rp5 Miliar S.d. Rp10 Miliar)	2.000.000	1.992.000	99,6
	- Honorarium Staf Pengelola (pagu Dana Di Atas Rp5 Miliar S.d. Rp10 Miliar)	7.680.000	7.400.000	96,35
	- Honorarium Pengurus/penyimpan Bmn Tingkat Pengguna Barang	2.400.000	2.400.000	100

LAPORAN AKUNTABILITAS KERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

KODE	OUTPUT / RINCIAN AKUN	PAGU	REALISASI	
			Rp	%
	- Honorarium Pengurus/penyimpan Bmn Tingkat Kuasa Pengguna Barang	1.800.000	1.800.000	100
	- Honorarium Ppabp	3.420.000	3.000.000	87,72
	- Honorarium Penanggung Jawab (uappa/barang-eii)	1.800.000	1.800.000	100
	- Honorarium Koordinator (uappa/barang-eii)	1.500.000	1.500.000	100
	- Honorarium Ketua/wakil Ketua (uappa/barang-eii)	1.200.000	1.200.000	100
	- Honorarium Anggota/petugas (uappa/barang-eii)	2.700.000	2.400.000	88,89
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19	83.410.000	83.273.464	99,84
	- Biaya Paket Data Dan Komunikasi Pejabat Setingkat Eselon I Dan li/ yang Setara	2.400.000	2.400.000	100
	- Biaya Paket Data Dan Komunikasi Pejabat Setingkat Eselon lii/ yang Setara Ke Bawah	21.000.000	21.000.000	100
	- Biaya Langganan Aplikasi Video Conference	6.010.000	5.873.464	97,73
	- Pengadaan Masker Dan Hand Sanitizer	36.000.000	36.000.000	100
	- Penambah Daya Tahan Tubuh Dan Vitamin	18.000.000	18.000.000	100
521211	Belanja Bahan	20.225.000	20.102.500	99,39
	- Cetak Dan Jilid Laporan	5.000.000	4.950.000	99
	- Cetak Kop Dan Map	10.000.000	9.955.000	99,55
	- Penggandaan	5.225.000	5.197.500	99,47
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	75.843.000	75.745.450	99,87
	- Alat Tulis Kantor	30.000.000	29.984.350	99,95
	- Komputer Supplies	30.000.000	29.957.400	99,86
	- Pembelian Alat-alat Kelistrikan	9.843.000	9.836.200	99,93
	- Pengharum Ruangan	6.000.000	5.967.500	99,46
522141	Belanja Sewa	109.500.000	97.898.757	89,41
	- Sewa Kendaraan Operasional Pejabat Eselon li (d.k.i. Jakarta)	53.000.000	47.084.257	88,84
	- Sewa Kendaraan Roda 4/minibus Operasional Kantor Dan/atau Lapangan (d.k.i. Jakarta)	26.500.000	26.064.500	98,36
	- Sewa Mesin Fotocopy (digital)	30.000.000	24.750.000	82,5
522191	Belanja Jasa Lainnya	47.275.000	43.750.000	92,54
	- Pemeriksaan Kesehatan Pegawai	47.275.000	43.750.000	92,54
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi Covid-19	76.000.000	66.808.700	87,91
	- Test Covid-19 Pegawai	76.000.000	66.808.700	87,91
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	27.000.000	14.580.000	54
	- Operasional Kendaraan Dinas Untuk Pengadaan Dari Sewa Pejabat Eselon li	17.000.000	14.580.000	85,76
	- Operasional Kendaraan Dinas Untuk Pengadaan Dari Sewa Operasional Kantor Dan/atau Lapangan	10.000.000	0	0
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	213.025.000	148.363.693	69,65
	- Perjalanan Dinas Dalam Rangka Monitoring Pimpinan	213.025.000	148.363.693	69,65
6561.EAB	Layanan Perencanaan Dan Penganggaran Internal	173.044.000	79.485.574	45,93
1	Layanan Tata Usaha Dan Dukungan Manajemen	173.044.000	79.485.574	45,93
51	Penyusunan Rencana Program Dan Penyusunan Rencana Anggaran	42.680.000	6.760.000	15,84
A	Tanpa Sub Komponen	42.680.000	6.760.000	15,84
521211	Belanja Bahan	10.280.000	4.060.000	39,49
	- Konsumsi Rapat	8.280.000	2.080.000	25,12
	- Penggandaan Bahan Dan Penjilidan Laporan	2.000.000	1.980.000	99
522151	Belanja Jasa Profesi	18.000.000	2.700.000	15
	- Narasumber Pembahas	18.000.000	2.700.000	15

LAPORAN AKUNTABILITAS KERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

KODE	OUTPUT / RINCIAN AKUN	PAGU	REALISASI	
			Rp	%
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	14.400.000	0	0
	- Transport Lokal	6.000.000	0	0
	- Uang Harian	8.400.000	0	0
52	Pelaksanaan Pemantauan Dan Evaluasi	48.584.000	22.539.574	46,39
A	Tanpa Sub Komponen	48.584.000	22.539.574	46,39
521211	Belanja Bahan	6.000.000	5.995.000	99,92
	- Penggandaan Bahan Dan Penjilidan Laporan	6.000.000	5.995.000	99,92
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	24.584.000	12.794.574	52,04
	<u>Perjalanan Dinas Dalam Rangka Monitoring Program Kegiatan 2021</u>			
	<u>Yogyakarta</u>			
	- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (pp) Ekonomi Jakarta - Jogjakarta	4.468.000	1.251.968	28,02
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (d.i. Yogyakarta)	2.520.000	1.260.000	50
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon Iv/golongan Iii (d.i. Yogyakarta)	3.380.000	2.698.506	79,84
	- Biaya Taksi Perjalanan Dinas	1.496.000	0	0
	<u>Bandung</u>			
	- Biaya Transportasi Jakarta - Bandung Pp	3.000.000	484.176	16,14
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (jawa Barat)	5.160.000	3.870.000	75
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon Iii (j A W A B A R A T)	4.560.000	3.229.924	70,83
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	18.000.000	3.750.000	20,83
	- Transport Lokal	7.500.000	1.650.000	22
	- Uang Harian	10.500.000	2.100.000	20
54	Pelayanan Tata Usaha Dan Rumah Tangga	81.780.000	50.186.000	61,37
A	Pelayanan Tu, Keuangan Dan Kepegawaian	81.780.000	50.186.000	61,37
521211	Belanja Bahan	8.280.000	0	0
	- Konsumsi	8.280.000	0	0
522191	Belanja Jasa Lainnya	60.000.000	48.686.000	81,14
	- Pelatihan Penerapan Sjh Kompetensi Penyelia Halal (berbasis Skkni No. 215-2016)	15.000.000	14.586.000	97,24
	- Diklat Pengadaan Barang Jasa, Diklat Penyusunan Lakip, Diklat Keuangan, Diklat Kepegawaian	10.000.000	0	0
	- Pelatihan Pengembangan Diri	35.000.000	34.100.000	97,43
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	13.500.000	1.500.000	11,11
	- Transport Lokal	3.900.000	1.500.000	38,46
	- Uang Harian Diklat	9.600.000	0	0
6561.EAD	Layanan Sarana Internal	258.700.000	258.692.820	100
1	Layanan Sarana Internal	258.700.000	258.692.820	100
51	Pengadaan Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran	258.700.000	258.692.820	100
A	Tanpa Sub Komponen	258.700.000	258.692.820	100
532111	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	258.700.000	258.692.820	100
	- Laptop	209.120.000	209.120.000	100
	- Belanja Modal Peralatan Kantor	49.580.000	49.572.820	99,99
	TOTAL	8.183.768.000	7.203.867.118	88,03

LAPORAN AKUNTABILITAS KERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

No.	Indikator	Target	TW I		TW II		TW III		TW IV		Real. Fisik	Real. Keu	Capaian
			T	R	T	R	T	R	T	R			
1. SS1 - Terumuskannya Rekomendasi Regulasi/Kebijakan Industri Halal													
	1.1 - Tersusunnya rekomendasi RPermenperin terkait industri halal Pagu = Rp. 335.126.000	1 RPermenperin	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	97%	0 RPermenperin
	1.2 - Tersusunnya draft panduan industri halal Pagu = Rp. 212.654.000	1 Draft Kepmen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	98%	0 Draft Kepmen
Total Pagu Sasaran = Rp. 547.780.000													
2. SS2 - Terlaksananya Sistem Informasi dan Promosi Industri Halal													
	2.1 - Tersedianya media dan kegiatan promosi pemberdayaan industri halal Pagu = Rp. 3.657.194.000	2 Media Promosi	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	89%	0 Media Promosi
	2.2 - Tersusunnya konsep pengembangan sistem informasi pemberdayaan industri halal Pagu = Rp. 92.000.000	1 Dokumen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	55%	0 Dokumen
Total Pagu Sasaran = Rp. 3.749.194.000													
3. SS3 - Terlaksananya Fasilitas dan Pembinaan untuk Mewujudkan Industri Halal yang Berdaya Saing													
	3.1 - Tersedianya SDM Industri Halal yg Kompeten Pagu = Rp. 0	30 Penyelia Halal	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	44 Penyelia Halal
Total Pagu Sasaran = Rp. 0													
4. SS4 - Terlaksananya Dukungan Manajemen yang efektif, efisien dan akuntabel													
	4.1 - Tersedianya Laporan Dukungan Manajemen Pagu = Rp. 2.577.931.000	4 Laporan	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	85%	2 Laporan
Total Pagu Sasaran = Rp. 2.577.931.000													
Total Pagu Keseluruhan = Rp. 6.874.905.000													

LAPORAN AKUNTABILITAS KERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

Tabel Penyelia Halal

No	NAMA ASESI	ASESOR	NO. REG ASESOR	PUTUSAN
1	Marsono	Sulistyo Budi	No. Reg. MET. 000.001118 2021	KOMPETEN
2	Anik Rustiani	Dewi Cholifah	No. Reg. MET. 000.000948 2017	KOMPETEN
3	Elvira Ghea Safitri	Edi Purwanto	No. Reg. MET. 000.001120 2021	KOMPETEN
4	Adhek Januar	Dewi Cholifah	No. Reg. MET. 000.000948 2017	KOMPETEN
5	Bimo Aryo Seto	Widodo Wahyudi	No. Reg. MET. 000.007913 2015	KOMPETEN
6	Agus Subekti	Sulistyo Budi	No. Reg. MET. 000.001118 2021	KOMPETEN
7	Faried Manaf	Edi Purwanto	No. Reg. MET. 000.001120 2021	KOMPETEN
8	Siti Masrurroh	Achmad Fatoni	No. Reg. MET. 000.001116 2021	KOMPETEN
9	Indah Rumaniyah	Sulistyo Budi	No. Reg. MET. 000.001118 2021	KOMPETEN
10	Sunarto	Widodo Wahyudi	No. Reg. MET. 000.007913 2015	KOMPETEN
11	Evi Handayani	Achmad Fatoni	No. Reg. MET. 000.001116 2021	KOMPETEN
12	Dian Purwaningtyas	Widodo Wahyudi	No. Reg. MET. 000.007913 2015	KOMPETEN
13	Dwi Pujiastuti	Dewi Cholifah	No. Reg. MET. 000.000948 2017	KOMPETEN
14	Fasichul Maghfuri	Achmad Fatoni	No. Reg. MET. 000.001116 2021	KOMPETEN
15	Chairatun Lies Setyorini	Achmad Fatoni	No. Reg. MET. 000.001116 2021	KOMPETEN
16	Vita Manda Fitriyanti	Sulistyo Budi	No. Reg. MET. 000.001118 2021	KOMPETEN
17	Lia Raya	Dewi Cholifah	No. Reg. MET. 000.000948 2017	KOMPETEN
18	Setyowati	Edi Purwanto	No. Reg. MET. 000.001120 2021	KOMPETEN
19	Andriyani	Widodo Wahyudi	No. Reg. MET. 000.007913 2015	KOMPETEN
20	Dwi Andayani	Gembong S. Purboyo	No. Reg. MET. 000.2419. 01 10946 2020	KOMPETEN
21	Adinda Yustisia Permata	Achmad Fatoni	No. Reg. MET. 000.001116 2021	KOMPETEN
22	Raisa Ayu Sekar Dewi, S.Farm.Apt	Dewi Cholifah	No. Reg. MET. 000.000948 2017	KOMPETEN
23	Tutuk Kurnia Wahyuningtias	Dewi Cholifah	No. Reg. MET. 000.000948 2017	KOMPETEN
24	Abdul Haris	Widodo Wahyudi	No. Reg. MET. 000.007913 2015	KOMPETEN
25	Fandy Fajrin	Edi Purwanto	No. Reg. MET. 000.001120 2021	KOMPETEN
26	Rosalina	Widodo Wahyudi	No. Reg. MET. 000.007913 2015	KOMPETEN
27	Titin Devi Irawati	Dewi Cholifah	No. Reg. MET. 000.000948 2017	KOMPETEN
28	Wafii Sami' Nuuran S	Sulistyo Budi	No. Reg. MET. 000.001118 2021	KOMPETEN
29	Noer Qonita	Dewi Cholifah	No. Reg. MET. 000.000948 2017	KOMPETEN
30	Ahmad Yusri Authoni	Sulistyo Budi	No. Reg. MET. 000.001118 2021	KOMPETEN
31	Sjarifah Dewi	Widodo Wahyudi	No. Reg. MET. 000.007913 2015	KOMPETEN
32	Sri Agustini	Edi Purwanto	No. Reg. MET. 000.001120 2021	KOMPETEN
33	Agung Setyanto	Achmad Fatoni	No. Reg. MET. 000.001116 2021	KOMPETEN
34	Ailsa Rania Azizy	Edi Purwanto	No. Reg. MET. 000.001120 2021	KOMPETEN
35	Lailiatul Khodriyah	Widodo Wahyudi	No. Reg. MET. 000.007913 2015	KOMPETEN
36	Ir. Tri Winarni	Dewi Cholifah	No. Reg. MET. 000.000948 2017	KOMPETEN
37	Ir. Herry Suharto	Achmad Fatoni	No. Reg. MET. 000.001116 2021	KOMPETEN
38	Dewi Triyaningsih	Sulistyo Budi	No. Reg. MET. 000.001118 2021	KOMPETEN
39	Ulfa Hurul Aini, S.Psi	Widodo Wahyudi	No. Reg. MET. 000.007913 2015	KOMPETEN
40	Muhammad Darmawan Ardiansyah	Sulistyo Budi	No. Reg. MET. 000.001118 2021	KOMPETEN
41	Khusnul Hotimah	Sulistyo Budi	No. Reg. MET. 000.001118 2021	KOMPETEN
42	Budhi Utami	Dewi Cholifah	No. Reg. MET. 000.000948 2017	KOMPETEN
43	Ratni Ernita	Gembong S. Purboyo	No. Reg. MET. 000.2419. 01 10946 2020	KOMPETEN
44	Bagus saputro	Widodo Wahyudi	No. Reg. MET. 000.007913 2015	KOMPETEN

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
PUSAT PEMBERDAYAAN INDUSTRI HALAL**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Junadi Marki
Jabatan : Kepala Pusat Pemberdayaan Industri Halal

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dody Widodo
Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 17 Desember 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



(DODY WIDODO)



(Junadi Marki)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
PUSAT PEMBERDAYAAN INDUSTRI HALAL

Kode SS	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Satuan
SS1	Meningkatnya Kinerja Industri Halal Dalam Negeri	1. Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di PPIH	75	Persen
		2. Tingkat sinergitas regulasi bidang industri halal	25	Persen
		3. Tingkat efektivitas pelaksanaan promosi dan kampanye industri halal	2,75	Skala (1-4)
SS2	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Industri Halal	1. Indeks tingkat pemahaman industri halal	2,75	Skala Likert
SS3	Meningkatnya Daya Saing Industri Dalam Negeri melalui Penguatan Ekosistem Industri Halal	1. Jumlah industri halal yang diberikan fasilitasi sertifikasi produk halal	45	Perusahaan
		2. Tersedianya SDM industri halal yang profesional dan kompeten	61	Orang
SS4	Meningkatnya Kinerja ASN dan Efektivitas Organisasi PPIH	1. Rata-rata indeks profesionalitas ASN PPIH	71	Indeks
SS5	Implementasi Aplikasi Knowledge Management secara optimal di PPIH	1. Rata-rata informasi yang dibagikan ke aplikasi Knowledge Management Intranet	6	Informasi
SS6	Terwujudnya Organisasi dan Tata Laksana yang Tepat Fungsi, Tepat Proses dan Tepat Ukuran di PPIH	1. Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) PPIH	3	Indeks
SS7	Terwujudnya Tata Kelola Keuangan, BMN, Sarana dan Prasarana PPIH yang Efektif dan Efisien	1. Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	91.5	Persen

Program Dukungan Manajemen

Kegiatan Pengembangan Industri Produk Halal

Total Anggaran Tahun 2021

: Rp 8.183.768.000,-

(Delapan miliar seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah)

Jakarta, 17 Desember 2021

SEKRETARIS JENDERAL

DODY WIDODO

Kepala Pusat Pemberdayaan Industri Halal

Junadi Marki